



**MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR SK.952/MENLHK/SETJEN/KUM.1/8/2023
TENTANG**

**DATA DAN INFORMASI KEGIATAN USAHA YANG TELAH TERBANGUN DI
DALAM KAWASAN HUTAN YANG TIDAK MEMILIKI PERIZINAN DI BIDANG
KEHUTANAN TAHAP XIV**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif dan Tata Cara Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berasal dari Denda Administratif di Bidang Kehutanan perlu dilakukan inventarisasi data dan informasi kegiatan usaha yang telah terbangun di dalam kawasan hutan yang tidak memiliki perizinan di bidang kehutanan;
- b. bahwa data dan informasi kegiatan usaha yang telah terbangun di dalam kawasan hutan yang tidak memiliki perizinan di bidang kehutanan sebagaimana dimaksud pada huruf a terdiri atas kegiatan usaha perkebunan, pertambangan, dan kegiatan lainnya meliputi minyak dan gas bumi, panas bumi, tambak, pertanian, permukiman, wisata alam, industri, dan/atau sarana dan prasarana;
- c. bahwa sesuai Pasal 17 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif dan Tata Cara Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berasal dari Denda Administratif di Bidang Kehutanan, data dan informasi sebagaimana dimaksud pada huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Menteri;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan tentang Data dan Informasi Kegiatan Usaha yang Telah Terbangun di Dalam Kawasan Hutan yang Tidak Memiliki Perizinan di Bidang Kehutanan;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif dan Tata Cara Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berasal dari Denda Administratif di Bidang Kehutanan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2021 tentang Penyelesaian Ketidaksesuaian Tata Ruang, Kawasan Hutan, Izin, dan/atau Hak atas Tanah;
9. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2021;
10. Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2020 tentang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
11. Keputusan Presiden Nomor 113/P Tahun 2019 tentang Pembentukan Kementerian Negara dan Pengangkatan Menteri Negara Kabinet Indonesia Maju Periode Tahun 2019 – 2024, sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 72/P Tahun 2021 tentang Pengangkatan Beberapa Menteri Negara Kabinet Indonesia Maju Periode Tahun 2019 – 2024;

12. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.18/MenLHK-II/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
13. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.32/MenLHK/Setjen/Kum.1/3/2016 tentang Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan;
14. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 4 Tahun 2021 tentang Daftar Usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup, Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup atau Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup;
15. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perencanaan Kehutanan, Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan dan Perubahan Fungsi Kawasan Hutan, serta Penggunaan Kawasan Hutan;
16. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi;
17. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Perhutanan Sosial;
18. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 15 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;

Memperhatikan : 1. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor SK.203/MENLHK/SETJEN/KUM.1/5/2021 tentang Satuan Pelaksanaan, Pengawasan dan Pengendalian Implementasi Undang-Undang tentang Cipta Kerja Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan, sebagaimana telah Diubah dengan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.641/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2022 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.203/MENLHK/SETJEN/KUM.1/5/2021 tentang Satuan Pelaksanaan, Pengawasan dan Pengendalian Implementasi Undang-Undang Tentang Cipta Kerja Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan;

2. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.359/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2021 tentang Data dan Informasi Kegiatan Usaha yang Telah Terbangun di Dalam Kawasan Hutan yang Tidak Memiliki Perizinan di Bidang Kehutanan;

3. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.531/MENLHK/SETJEN/KUM.1/8/2021 tentang Data dan Informasi Kegiatan Usaha yang Telah Terbangun di Dalam Kawasan Hutan yang Tidak Memiliki Perizinan di Bidang Kehutanan Tahap II;
4. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.1217/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2021 tentang Data dan Informasi Kegiatan Usaha yang Telah Terbangun di Dalam Kawasan Hutan yang Tidak Memiliki Perizinan di Bidang Kehutanan Tahap III;
5. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.64/MENLHK/SETJEN/KUM.1/1/2022 tentang Data dan Informasi Kegiatan Usaha yang Telah Terbangun di Dalam Kawasan Hutan yang Tidak Memiliki Perizinan di Bidang Kehutanan Tahap IV;
6. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.298/MENLHK/SETJEN/KUM.1/4/2022 tentang Data dan Informasi Kegiatan Usaha yang Telah Terbangun di Dalam Kawasan Hutan yang Tidak Memiliki Perizinan di Bidang Kehutanan Tahap V;
7. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.652/MENLHK/SETJEN/KUM.1/7/2022 tentang Data dan Informasi Kegiatan Usaha yang Telah Terbangun di Dalam Kawasan Hutan yang Tidak Memiliki Perizinan di Bidang Kehutanan Tahap VI;
8. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.787/MENLHK/SETJEN/KUM.1/7/2022 tentang Data dan Informasi Kegiatan Usaha yang Telah Terbangun di Dalam Kawasan Hutan yang Tidak Memiliki Perizinan di Bidang Kehutanan Tahap VII;
9. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor SK.1077/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2022 tentang Data dan Informasi Kegiatan Usaha yang Telah Terbangun di Dalam Kawasan Hutan yang Tidak Memiliki Perizinan di Bidang Kehutanan Tahap VIII;
10. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor SK.1205/MENLHK/SETJEN/KUM.1/11/2022 tentang Data dan Informasi Kegiatan Usaha yang Telah Terbangun di Dalam Kawasan Hutan yang Tidak Memiliki Perizinan di Bidang Kehutanan Tahap IX;
11. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.1345/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2022 tentang Data dan Informasi Kegiatan Usaha yang Telah Terbangun di Dalam Kawasan Hutan yang Tidak Memiliki Perizinan di Bidang Kehutanan Tahap X;

12. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.196/MENLHK/SETJEN/KUM.1/3/2023 tentang Data dan Informasi Kegiatan Usaha yang Telah Terbangun di Dalam Kawasan Hutan yang Tidak Memiliki Perizinan di Bidang Kehutanan Tahap XI;
13. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.227/MENLHK/SETJEN/KUM.1/3/2023 tentang Percepatan Proses Penyelesaian Penggunaan Kawasan Hutan Tanpa Perizinan Di Bidang Kehutanan sebagai Implementasi Undang-Undang Cipta Kerja Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
14. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.322/MENLHK/SETJEN/KUM.1/4/2023 tentang Data dan Informasi Kegiatan Usaha yang Telah Terbangun di Dalam Kawasan Hutan yang Tidak Memiliki Perizinan di Bidang Kehutanan Tahap XII;
15. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.604/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2023 tentang Data dan Informasi Kegiatan Usaha yang Telah Terbangun di Dalam Kawasan Hutan yang Tidak Memiliki Perizinan di Bidang Kehutanan Tahap XIII;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN TENTANG DATA DAN INFORMASI KEGIATAN USAHA YANG TELAH TERBANGUN DI DALAM KAWASAN HUTAN YANG TIDAK MEMILIKI PERIZINAN DI BIDANG KEHUTANAN TAHAP XIV.
- KESATU : Menetapkan Data dan Informasi Kegiatan Usaha yang Telah Terbangun di Dalam Kawasan Hutan yang Tidak Memiliki Perizinan di Bidang Kehutanan Tahap XIV sebagaimana tercantum pada Lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Data dan informasi kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Amar KESATU tercantum dalam Lampiran Keputusan ini:
- a. subjek hukum;
 - b. jenis kegiatan;
 - c. lokasi kegiatan yang meliputi wilayah administratif, kawasan hutan, dan kesesuaian ruang;
 - d. luasan indikatif areal terbuka; dan
 - e. skema penyelesaian sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.

- KETIGA : Data dan informasi sebagaimana dimaksud pada Amar KEDUA akan dipergunakan sebagai dasar untuk dilakukan verifikasi lebih lanjut guna mengetahui kebenaran dan kesesuaiannya dengan fakta lapangan berdasarkan Pasal 21 dan Pasal 34 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif dan Tata Cara Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berasal dari Denda Administratif di Bidang Kehutanan.
- KEEMPAT : Luasan Indikatif areal terbuka sebagaimana dimaksud dalam Amar KEDUA huruf d, ditetapkan setelah dilakukan pemeriksaan melalui citra satelit dan pemeriksaan di Lapangan.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dan akan dilakukan perbaikan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dan/atau pemutakhiran data dan informasi kegiatan usaha yang telah terbangun di dalam kawasan hutan yang tidak memiliki perizinan di bidang kehutanan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 22 Agustus 2023

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN
KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SITI NURBAYA



SALINAN Keputusan ini disampaikan Kepada Yth:

1. Wakil Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
3. Inspektur Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
4. Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan;
5. Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari;
6. Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem;
7. Direktorat Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan;
8. Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : SK.952/MENLHK/SETJEN/KUM.1/8/2023
TANGGAL : 22 AGUSTUS 2023
TENTANG : DATA DAN INFORMASI KEGIATAN USAHA YANG TELAH TERBANGUN DI DALAM KAWASAN HUTAN
YANG TIDAK MEMILIKI PERIZINAN DI BIDANG KEHUTANAN TAHAP XIV

No.	Subyek Hukum	Jenis Kegiatan	Lokasi Kegiatan			Luasan Indikatif Areal Terbuka (Ha)	Skema Penyelesaian Sesuai UU Cipta Kerja
			Wilayah Administratif	Kawasan Hutan	Kesesuaian Ruang		
1.	KT Saroha Jaya	Perkebunan Kelapa Sawit	Kabupaten Pelalawan	HPT		±136,11	Pasal 110 B/Perhutanan Sosial
2.	KT Sehati	Perkebunan Kelapa Sawit	Kabupaten Pelalawan	HPT		±291,66	Pasal 110 B/Perhutanan Sosial
3.	KT Mamahan Mandiri Jaya	Perkebunan Kelapa Sawit	Kabupaten Pelalawan	HPT		±151,93	Pasal 110 B/Perhutanan Sosial
4.	KT Marona Sawit Abadi	Perkebunan Kelapa Sawit	Kabupaten Pelalawan	HPT		±14,17	Pasal 110 B/Perhutanan Sosial
5.	KT Gemilang Sejahtera	Perkebunan Kelapa Sawit	Kabupaten Pelalawan	HPT, HP		±258,37	Pasal 110 B/Perhutanan Sosial
6.	KT Mitra Sejahtera	Perkebunan Kelapa Sawit	Kabupaten Siak	HP, APL		±0,20	Pasal 110 B/Perhutanan Sosial
7.	KT Tuah Negeri	Perkebunan Kelapa Sawit	Kabupaten Kampar	HP, HPK, APL		±15,04	Pasal 110 B/Perhutanan Sosial
8.	KT Tuah Melayu	Perkebunan Kelapa Sawit	Kabupaten Kampar	HP, APL		±270,90	Pasal 110 B/Perhutanan Sosial
9.	KT Sri Rezeki (Riau)	Perkebunan Kelapa Sawit	Kabupaten Dumai	HP		±1.549,92	Pasal 110 B/Perhutanan Sosial
10.	KT Makmur Jaya	Permukiman dan perkebunan sawit	Kabupaten Pelalawan	HPT		±42,77	Pasal 110 B/Perhutanan Sosial
11.	Koperasi Maju Indah Bersama	Permukiman dan perkebunan sawit	Kabupaten Indragiri Hulu	HP		±358,04	Pasal 110 B/Perhutanan Sosial

No.	Subyek Hukum	Jenis Kegiatan	Lokasi Kegiatan			Luasan Indikatif Areal Terbuka (Ha)	Skema Penyelesaian Sesuai UU Cipta Kerja
			Wilayah Administratif	Kawasan Hutan	Kesesuaian Ruang		
12.	KT Kasang Aek Niate	Permukiman dan perkebunan sawit	Kabupaten Rokan Hulu	HPT		±267,54	Pasal 110 B/Perhutanan Sosial
13.	KT Mentaya Multi Mandiri	Permukiman dan perkebunan sawit	Kabupaten Kotawaringin Timur	HP, HPK, APL		±96,27	Pasal 110 B/Perhutanan Sosial
14.	KT Agro Alam	Permukiman dan perkebunan sawit	Kabupaten Kotawaringin Timur	HPK		±11,05	Pasal 110 B/Perhutanan Sosial
15.	KT Mahato Hijau	Permukiman dan perkebunan sawit	Kabupaten Rokan Hulu	HL		±8.604,57	Pasal 110 B/Perhutanan Sosial
16.	Raja Aman Siregar	Pernakan dan lahan pertanian masyarakat	Kabupaten Tapanuli Selatan	HP		±15,26	Pasal 110 B/Perhutanan Sosial
17.	Penghulu Kampung Bekalar	Penguasaan Tanah	Kampun Bekalar, Kec. Kandis, Kabupaten Siak, Riau	HP, HPT		±3.004,00	Pasal 110 B/Penataan Kawasan Hutan
18.	Lembaga Konservasi Lingkungan Hidup Kabupaten Batu Bara	Perladangan Palawija	Desa Kuala Indah Kecamatan Sei Suka Kabupaten Batu Bara	HPT		±466,00	Pasal 110 B/Penataan Kawasan Hutan
19.	Mentawai Surf Retreat Sumatera, PT	Resor	Desa Pasakit Tailieleu Kec Siberut Barat Daya Kab Kepulauan Mentawai	HP		±5,00	Pasal 110 B
20.	Hidden Bay Resort Mentawais, PT	Resor	Desa Katurei Kec Siberut Barat Daya Kab Kepulauan Mentawai	HP		±7,00	Pasal 110 B

No.	Subyek Hukum	Jenis Kegiatan	Lokasi Kegiatan			Luasan Indikatif Areal Terbuka (Ha)	Skema Penyelesaian Sesuai UU Cipta Kerja
			Wilayah Administratif	Kawasan Hutan	Kesesuaian Ruang		
21.	Harta Karun, PT	Resor	Desa Katurei Kec Siberut Barat Daya Kab Kepulauan Mentawai	HP		±22,00	Pasal 110 B
22.	Usaha Anak Negeri, PT	Resor	Pulau Buasak Kec Siberut Barat Daya Kab Kepulauan Mentawai	HP		±0,70	Pasal 110 B
23.	Five Star Mentawai, PT	Resor	Peigu Dusun Magilik Desa Katurei Kec Siberut Barat Daya Kabupaten Kepulauan Mentawai	HP		±1,60	Pasal 110 B
24.	Awang Sejahtera, PT	OP Batubara dan Sarana Penunjangnya	Kotawaringin Timur	HPK		±7,61	Pasal 110 B
25.	Mirasindo Perdana, PT	OP Batu Granit	Karimun	HPT		±2,53	Pasal 110 B
26.	Citra Lampia Mandiri, PT	OP Nikel	Luwu Timur	HPT		±0,31	Pasal 110 B
27.	Ratok Mining, PT	OP Emas	Minahasa Tenggara	HPT		±14,82	Pasal 110 B
28.	Bonehau Prima Coal, PT	OP Batubara dan Sarana Penunjangnya	Mamuju	HP		±4,46	Pasal 110 B
29.	Frits Janri Rares dkk	Perkebunan Kelapa Sawit	Kabupaten Kampar	HPT		±320,92	Pasal 110 B/Penataan Kawasan Hutan
30.	Maryati Hutaaruk dkk	Perkebunan Kelapa Sawit	Kabupaten Kampar	HP		±85,71	Pasal 110 B/Penataan Kawasan Hutan

No.	Subyek Hukum	Jenis Kegiatan	Lokasi Kegiatan			Luasan Indikatif Areal Terbuka (Ha)	Skema Penyelesaian Sesuai UU Cipta Kerja
			Wilayah Administratif	Kawasan Hutan	Kesesuaian Ruang		
31.	Sugiman	Penguasaan Lahan, TORA	Desa Boncah Mahang Kec. Mandau Kabupaten Bengkalis Riau	HPK		±2,05	Pasal 110 B/Penataan Kawasan Hutan
32.	KTHK Kayu Kunyit (26 org)	Perkebunan Lainnya	Ds. Pandan Arang, Kec. Kikim Selatan, Kab. Lahat, Sumatera Selatan	HSA KH Gumai Tebing Tinggi		±25,50	Pasal 110 B/Kemitraan Konservasi
33.	KTHK Arikh Ersada (15 org)	Perkebunan Lainnya	Ds. Suka Makmur, Kec. Kutalimbaru, Kab. Deli Serdang, Sumatera Utara	THR Bukit Barisan		±64,80	Pasal 110 B/Kemitraan Konservasi
34.	KTHK Alur Pinang (24 org)	Perkebunan Lainnya	Ds. Batu Hamparan, Kec. Lawe Alas, Kab. Aceh Tenggara, Aceh	TN Gunggung Leuser		±40,50	Pasal 110 B/Kemitraan Konservasi
35.	KTHK Bur Lintang (20 org)	Perkebunan Lainnya	Ds. Batu Hamparan, Kec. Lawe Alas, Kab. Aceh Tenggara, Aceh	TN Gunggung Leuser		±34,00	Pasal 110 B/Kemitraan Konservasi
36.	KTHK Gunung Selamet (32 org)	Perkebunan Lainnya	Ds. Batu Hamparan, Kec. Lawe Alas, Kab. Aceh Tenggara, Aceh	TN Gunggung Leuser		±54,50	Pasal 110 B/Kemitraan Konservasi
37.	KTHK Niet Jaroh (23 org)	Perkebunan Lainnya	Ds. Batu Hamparan, Kec. Lawe Alas, Kab. Aceh Tenggara, Aceh	TN Gunggung Leuser		±57,00	Pasal 110 B/Kemitraan Konservasi
38.	KTHK Tuah Sepakat (22 org)	Perkebunan Lainnya	Ds. Batu Hamparan, Kec. Lawe Alas, Kab. Aceh Tenggara, Aceh	TN Gunggung Leuser		±46,00	Pasal 110 B/Kemitraan Konservasi

No.	Subyek Hukum	Jenis Kegiatan	Lokasi Kegiatan			Luasan Indikatif Areal Terbuka (Ha)	Skema Penyelesaian Sesuai UU Cipta Kerja
			Wilayah Administratif	Kawasan Hutan	Kesesuaian Ruang		
39.	KTHK Maju Bersama (25 org)	Perkebunan lainnya	Ds. Suka Makmur, Kec. Kutalimbaru, Kab. Deli Serdang, Sumatera Utara	TN Gunung Leuser		±40,00	Pasal 110 B/Kemitraan Konservasi
40.	KTHK Tengguili (21 org)	Perkebunan lainnya	Ds. Suka Makmur, Kec. Kutalimbaru, Kab. Deli Serdang, Sumatera Utara	TN Gunung Leuser		±40,00	Pasal 110 B/Kemitraan Konservasi
41.	KTHK Alue Bili Berkah (38 org)	Perkebunan lainnya	Ds. Pucuk Lembang, Kec. Kliet Timur, Kab. Aceh Selatan, Aceh	TN Gunung Leuser		±28,30	Pasal 110 B/Kemitraan Konservasi
42.	KTHK Kemuan Sejahtera (41 org)	Perkebunan lainnya	Ds. Pucuk Lembang, Kec. Kliet Timur, Kab. Aceh Selatan, Aceh	TN Gunung Leuser		±35,40	Pasal 110 B/Kemitraan Konservasi
43.	KTHK Arul Nege (55 org)	Perkebunan lainnya	Ds. Pungke Jaya, Kec. Putri Betung, Kab. Gayo Lues, Aceh	TN Gunung Leuser		±174,50	Pasal 110 B/Kemitraan Konservasi
44.	KTHK Atu Belah (23 org)	Perkebunan lainnya	Ds. Pungke Jaya, Kec. Putri Betung, Kab. Gayo Lues, Aceh	TN Gunung Leuser		±53,00	Pasal 110 B/Kemitraan Konservasi
45.	KTHK Atu Ijo (37 org)	Perkebunan lainnya	Ds. Pungke Jaya, Kec. Putri Betung, Kab. Gayo Lues, Aceh	TN Gunung Leuser		±85,50	Pasal 110 B/Kemitraan Konservasi
46.	KTHK Atu Putih (24 org)	Perkebunan lainnya	Ds. Pungke Jaya, Kec. Putri Betung, Kab. Gayo Lues, Aceh	TN Gunung Leuser		±63,80	Pasal 110 B/Kemitraan Konservasi

No.	Subyek Hukum	Jenis Kegiatan	Lokasi Kegiatan			Luasan Indikatif Areal Terbuka (Ha)	Skema Penyelesaian Sesuai UU Cipta Kerja
			Wilayah Administratif	Kawasan Hutan	Kesesuaian Ruang		
47.	KTHK Don't Love (16 org)	Perkebunan Lainnya	Ds. Pungke Jaya, Kec. Putri Betung, Kab. Gayo Lues, Aceh	TN Gunung Leuser		±39,00	Pasal 110 B/Kemitraan Konservasi
48.	KTHK Gule Ilang (27 org)	Perkebunan Lainnya	Ds. Pungke Jaya, Kec. Putri Betung, Kab. Gayo Lues, Aceh	TN Gunung Leuser		±71,00	Pasal 110 B/Kemitraan Konservasi
49.	KTHK Sepakat Maju (36 org)	Perkebunan Lainnya	Ds. Mbarung Datuk Saudane, Kec. Babussalam, Kab. Aceh Tenggara, Aceh	TN Gunung Leuser		±82,00	Pasal 110 B/Kemitraan Konservasi
50.	KTHK Sepakat Hijau (45 org)	Perkebunan Lainnya	Ds. Mbarung Datuk Saudane, Kec. Babussalam, Kab. Aceh Tenggara, Aceh	TN Gunung Leuser		±98,00	Pasal 110 B/Kemitraan Konservasi
51.	KTHK Sepakat Segenep (43 org)	Perkebunan Lainnya	Ds. Mbarung Datuk Saudane, Kec. Babussalam, Kab. Aceh Tenggara, Aceh	TN Gunung Leuser		±93,50	Pasal 110 B/Kemitraan Konservasi
52.	KTHK Sepakat Konservasi (14 org)	Perkebunan Lainnya	Ds. Mbarung Datuk Saudane, Kec. Babussalam, Kab. Aceh Tenggara, Aceh	TN Gunung Leuser		±34,00	Pasal 110 B/Kemitraan Konservasi
53.	KTHK Anugerah Leuser Ketambe (36 org)	Perkebunan Lainnya	Ds. Ketambe, Kec. Ketambe, Kab. Aceh Tenggara, Aceh	TN Gunung Leuser		±49,50	Pasal 110 B/Kemitraan Konservasi

No.	Subyek Hukum	Jenis Kegiatan	Lokasi Kegiatan			Luasan Indikatif Areal Terbuka (Ha)	Skema Penyelesaian Sesuai UU Cipta Kerja
			Wilayah Administratif	Kawasan Hutan	Kesesuaian Ruang		
54.	KTHK Ketambe Leuser (28 org)	Perkebunan Lainnya	Ds. Ketambe, Kec.Ketambe, Kab. Aceh Tenggara, Aceh	TN Gunung Leuser		±47,00	Pasal 110 B/Kemitraan Konservasi
55.	KTHK Seri Murri (48 org)	Perkebunan Lainnya	Ds. Darul Makmur, Kec. Darul Hasanah, Kab. Aceh Tenggara, Aceh	TN Gunung Leuser		±71,30	Pasal 110 B/Kemitraan Konservasi
56.	KTHK Berkat Bersama 48 org)	Perkebunan Lainnya	Ds. Darul Makmur, Kec. Darul Hasanah, Kab. Aceh Tenggara, Aceh	TN Gunung Leuser		±76,30	Pasal 110 B/Kemitraan Konservasi
57.	KTHK Lestari Libung (40 org)	Perkebunan Lainnya	Ds. Tajung Mbakhu, Kec. Darul Hasanah, Kab. Aceh Tenggara, Aceh	TN Gunung Leuser		±79,00	Pasal 110 B/Kemitraan Konservasi
58.	KTHK Bur Listrik (13 org)	Perkebunan Lainnya	Ds. Jambur Damar, Kec. Tanoh Alas, Kab.Aceh Tenggara, Aceh	TN Gunung Leuser		±20,00	Pasal 110 B/Kemitraan Konservasi
59.	KTHK Singah Mata (28 org)	Perkebunan Lainnya	Ds. Jambur Damar, Kec. Tanoh Alas, Kab.Aceh Tenggara, Aceh	TN Gunung Leuser		±56,00	Pasal 110 B/Kemitraan Konservasi
60.	KTHK Musara Ate Pondok 10 (21 org)	Perkebunan Lainnya	Ds. Jambukh Pekhmake, Kec. Tanoh Alas, Kab. Aceh Tenggara, Aceh	TN Gunung Leuser		±41,00	Pasal 110 B/Kemitraan Konservasi

No.	Subyek Hukum	Jenis Kegiatan	Lokasi Kegiatan			Luasan Indikatif Areal Terbuka (Ha)	Skema Penyelesaian Sesuai UU Cipta Kerja
			Wilayah Administratif	Kawasan Hutan	Kesesuaian Ruang		
61.	KTHK Batu Bidung (12 org)	Perkebunan Lainnya	Ds. Pandan Arang, Kec. Kikim Selatan, Kab. Lahat, Sumatera Selatan	HSA KH Gumai Tebing Tinggi		±7,90	Pasal 110 B/Kemitraan Konservasi
62.	KTHK Sridamai 01 (60 org)	Perkebunan Lainnya	Ds. Suka Damai, Kec. Tungkal Jaya, Kab. Musi Banyuasin	SM Bentayan		±154,60	Pasal 110 B/Kemitraan Konservasi
63.	KTHK Sridamai 02 (59 org)	Perkebunan Lainnya	Ds. Suka Damai, Kec. Tungkal Jaya, Kab. Musi Banyuasin	SM Bentayan		±118,70	Pasal 110 B/Kemitraan Konservasi
64.	KTHK Sridamai 03 (93 org)	Perkebunan Lainnya	Ds. Suka Damai, Kec. Tungkal Jaya, Kab. Musi Banyuasin	SM Bentayan		±258,30	Pasal 110 B/Kemitraan Konservasi
65.	Gapoktan Gap Mandiri (216 org)	Perkebunan Lainnya	Ds. PusuK, Kec. Kelapa, Kab. Bangka Barat	TN Gunung Maras		±53,10	Pasal 110 B/Kemitraan Konservasi
66.	Gapoktan Buluh Peridu (150 org)	Perkebunan Lainnya	Ds. Pangkalniur, Kec. Riau Siliip, Kab. Bangka	TN Gunung Maras		±79,40	Pasal 110 B/Kemitraan Konservasi
67.	Marjo	Sarpras Wisata	Ds. Gunungpicung, Kec. Pamijahan, Kab. Bogor	TN Gunung Halimun Salak		±1,00	Pasal 110 B/Kemitraan Konservasi
68.	Edi (1)	Sarpras Wisata	Ds. Gunungpicung, Kec. Pamijahan, Kab. Bogor	TN Gunung Halimun Salak		±0,30	Pasal 110 B/Kemitraan Konservasi

No.	Subyek Hukum	Jenis Kegiatan	Lokasi Kegiatan			Luasan Indikatif Areal Terbuka (Ha)	Skema Penyelesaian Sesuai UU Cipta Kerja
			Wilayah Administratif	Kawasan Hutan	Kesesuaian Ruang		
69.	Dudung	Sarpras Wisata	Ds. Gunungsari, Kec. Pamijahan, Kab. Bogor	TN Gunung Halimun Salak		±0,50	Pasal 110 B/Kemitraan Konservasi
70.	Sandi & Jhonson	Sarpras Wisata	Ds. Gunungsari, Kec. Pamijahan, Kab. Bogor	TN Gunung Halimun Salak		±0,50	Pasal 110 B/Kemitraan Konservasi
71.	Bund Sudiono	Sarpras Wisata	Ds. Gunungsari, Kec. Pamijahan, Kab. Bogor	TN Gunung Halimun Salak		±0,50	Pasal 110 B/Kemitraan Konservasi
72.	Rahman	Sarpras Wisata	Ds. Gunungsari, Kec. Pamijahan, Kab. Bogor	TN Gunung Halimun Salak		±0,50	Pasal 110 B/Kemitraan Konservasi
73.	Remi	Sarpras Wisata	Ds. Gunungsari, Kec. Pamijahan, Kab. Bogor	TN Gunung Halimun Salak		±0,10	Pasal 110 B/Kemitraan Konservasi
74.	Zaenudin	Sarpras Wisata	Ds. Gunungsari, Kec. Pamijahan, Kab. Bogor	TN Gunung Halimun Salak		±0,20	Pasal 110 B/Kemitraan Konservasi
75.	Veronica Minarsih	Sarpras Wisata	Ds. Gunungsari, Kec. Pamijahan, Kab. Bogor	TN Gunung Halimun Salak		±1,00	Pasal 110 B/Kemitraan Konservasi

No.	Subyek Hukum	Jenis Kegiatan	Lokasi Kegiatan			Luasan Indikatif Areal Terbuka (Ha)	Skema Penyelesaian Sesuai UU Cipta Kerja
			Wilayah Administratif	Kawasan Hutan	Kesesuaian Ruang		
76.	Rudi	Sarpras Wisata	Ds. Gunungpicung, Kec. Pamijahan, Kab. Bogor	TN Gunung Halimun Salak		±0,00	Pasal 110 B/Kemitraan Konservasi
77.	Heri, Darsono&Hj. Lili	Sarpras Wisata	Ds. Gunungsari, Kec. Pamijahan, Kab. Bogor	TN Gunung Halimun Salak		±0,10	Pasal 110 B/Kemitraan Konservasi
78.	Herman Husada	Sarpras Wisata	Ds. Gunungsari, Kec. Pamijahan, Kab. Bogor	TN Gunung Halimun Salak		±0,40	Pasal 110 B/Kemitraan Konservasi
79.	dr. Iwan, dr Doni, dr.	Sarpras Wisata	Ds. Gunungsari, Kec. Pamijahan, Kab. Bogor	TN Gunung Halimun Salak		±1,00	Pasal 110 B/Kemitraan Konservasi
80.	Vera	Sarpras Wisata	Ds. Gunungsari, Kec. Pamijahan, Kab. Bogor	TN Gunung Halimun Salak		±0,10	Pasal 110 B/Kemitraan Konservasi
81.	H. Onden (1)	Sarpras Wisata	Ds. Gunungsari, Kec. Pamijahan, Kab. Bogor	TN Gunung Halimun Salak		±0,30	Pasal 110 B/Kemitraan Konservasi
82.	H. Onden (2)	Sarpras Wisata	Ds. Gunungsari, Kec. Pamijahan, Kab. Bogor	TN Gunung Halimun Salak		±0,20	Pasal 110 B/Kemitraan Konservasi

No.	Subyek Hukum	Jenis Kegiatan	Lokasi Kegiatan			Luasan Indikatif Areal Terbuka (Ha)	Skema Penyelesaian Sesuai UU Cipta Kerja
			Wilayah Administratif	Kawasan Hutan	Kesesuaian Ruang		
83.	H.Nasikin	Sarpras Wisata	Ds. Gunungsari, Kec. Pamijahan, Kab. Bogor	TN Gunung Halimun Salak		±0,00	Pasal 110 B/Kemitraan Konservasi
84.	Gen Bertaldi	Sarpras Wisata	Ds. Gunungsari, Kec. Pamijahan, Kab. Bogor	TN Gunung Halimun Salak		±0,40	Pasal 110 B/Kemitraan Konservasi
85.	H.Agus	Sarpras Wisata	Ds. Gunungsari, Kec. Pamijahan, Kab. Bogor	TN Gunung Halimun Salak		±0,00	Pasal 110 B/Kemitraan Konservasi
86.	Soleh	Sarpras Wisata	Ds. Gunungsari, Kec. Pamijahan, Kab. Bogor	TN Gunung Halimun Salak		±0,20	Pasal 110 B/Kemitraan Konservasi
87.	Susan	Sarpras Wisata	Ds. Gunungsari, Kec. Pamijahan, Kab. Bogor	TN Gunung Halimun Salak		±4,00	Pasal 110 B/Kemitraan Konservasi
88.	Joko	Sarpras Wisata	Ds. Gunungsari, Kec. Pamijahan, Kab. Bogor	TN Gunung Halimun Salak		±0,20	Pasal 110 B/Kemitraan Konservasi
89.	Fadhil	Sarpras Wisata	Ds. Gunungsari, Kec. Pamijahan, Kab. Bogor	TN Gunung Halimun Salak		±0,10	Pasal 110 B/Kemitraan Konservasi

No.	Subyek Hukum	Jenis Kegiatan	Lokasi Kegiatan			Luasan Indikatif Areal Terbuka (Ha)	Skema Penyelesaian Sesuai UU Cipta Kerja
			Wilayah Administratif	Kawasan Hutan	Kesesuaian Ruang		
90.	Sammin	Sarpras Wisata	Ds. Gunungsari, Kec. Pamijahan, Kab. Bogor	TN Gunung Halimun Salak		±0,00	Pasal 110 B/Kemitraan Konservasi
91.	Ujang	Sarpras Wisata	Ds. Gunungpicung, Kec. Pamijahan, Kab. Bogor	TN Gunung Halimun Salak		±0,10	Pasal 110 B/Kemitraan Konservasi
92.	dr. Indra	Sarpras Wisata	Ds. Gunungpicung, Kec. Pamijahan, Kab. Bogor	TN Gunung Halimun Salak		±0,20	Pasal 110 B/Kemitraan Konservasi
93.	Edi (2)	Sarpras Wisata	Ds. Gunungpicung, Kec. Pamijahan, Kab. Bogor	TN Gunung Halimun Salak		±2,00	Pasal 110 B/Kemitraan Konservasi
94.	Syamsul	Sarpras Wisata	Ds. Gunungpicung, Kec. Pamijahan, Kab. Bogor	TN Gunung Halimun Salak		±0,20	Pasal 110 B/Kemitraan Konservasi
95.	Muhidin	Sarpras Wisata	Ds. Gunungpicung, Kec. Pamijahan, Kab. Bogor	TN Gunung Halimun Salak		±0,00	Pasal 110 B/Kemitraan Konservasi
96.	Ramlan	Sarpras Wisata	Ds. Gunungpicung, Kec. Pamijahan, Kab. Bogor	TN Gunung Halimun Salak		±0,10	Pasal 110 B/Kemitraan Konservasi

No.	Subyek Hukum	Jenis Kegiatan	Lokasi Kegiatan			Luasan Indikatif Areal Terbuka (Ha)	Skema Penyelesaian Sesuai UU Cipta Kerja
			Wilayah Administratif	Kawasan Hutan	Kesesuaian Ruang		
97.	Naib	Sarpras Wisata	Ds. Gunungpicung, Kec. Pamijahan, Kab. Bogor	TN Gunung Halimun Salak		±0,90	Pasal 110 B/Kemitraan Konservasi
98.	Apeng	Sarpras Wisata	Ds. Gunungsari, Kec. Pamijahan, Kab. Bogor	TN Gunung Halimun Salak		±0,40	Pasal 110 B/Kemitraan Konservasi
99.	Ludiono	Sarpras Wisata	Ds. Gunungsari, Kec. Pamijahan, Kab. Bogor	TN Gunung Halimun Salak		±0,10	Pasal 110 B/Kemitraan Konservasi
100.	Kurnia	Sarpras Wisata	Ds. Gunungsari, Kec. Pamijahan, Kab. Bogor	TN Gunung Halimun Salak		±5,00	Pasal 110 B/Kemitraan Konservasi
101.	Usman	Sarpras Wisata	Ds. Gunungsari, Kec. Pamijahan, Kab. Bogor	TN Gunung Halimun Salak		±0,10	Pasal 110 B/Kemitraan Konservasi
102.	Acay	Sarpras Wisata	Ds. Gunungsari, Kec. Pamijahan, Kab. Bogor	TN Gunung Halimun Salak		±0,10	Pasal 110 B/Kemitraan Konservasi
103.	Ivan	Sarpras Wisata	Ds. Gunungsari, Kec. Pamijahan, Kab. Bogor	TN Gunung Halimun Salak		±0,10	Pasal 110 B/Kemitraan Konservasi

No.	Subyek Hukum	Jenis Kegiatan	Lokasi Kegiatan			Luasan Indikatif Areal Terbuka (Ha)	Skema Penyelesaian Sesuai UU Cipta Kerja
			Wilayah Administratif	Kawasan Hutan	Kesesuaian Ruang		
104.	Icang	Sarpras Wisata	Ds. Gunungsari, Kec. Pamijahan, Kab. Bogor	TN Gunung Halimun Salak		±1,00	Pasal 110 B/Kemitraan Konservasi
105.	Ragil	Sarpras Wisata	Ds. Gunungsari, Kec. Pamijahan, Kab. Bogor	TN Gunung Halimun Salak		±1,00	Pasal 110 B/Kemitraan Konservasi
106.	Acil	Sarpras Wisata	Ds. Gunungsari, Kec. Pamijahan, Kab. Bogor	TN Gunung Halimun Salak		±0,10	Pasal 110 B/Kemitraan Konservasi
107.	Haeder	Sarpras Wisata	Ds. Gunungsari, Kec. Pamijahan, Kab. Bogor	TN Gunung Halimun Salak		±3,00	Pasal 110 B/Kemitraan Konservasi
108.	Dedi	Sarpras Wisata	Ds. Gunungsari, Kec. Pamijahan, Kab. Bogor	TN Gunung Halimun Salak		±0,20	Pasal 110 B/Kemitraan Konservasi
109.	Ani/Poniman	Sarpras Wisata	Ds. Gunungsari, Kec. Pamijahan, Kab. Bogor	TN Gunung Halimun Salak		±10,00	Pasal 110 B/Kemitraan Konservasi
110.	Irsandi	Sarpras Wisata	Ds. Gunungsari, Kec. Pamijahan, Kab. Bogor	TN Gunung Halimun Salak		±0,00	Pasal 110 B/Kemitraan Konservasi

No.	Subyek Hukum	Jenis Kegiatan	Lokasi Kegiatan			Luasan Indikatif Areal Terbuka (Ha)	Skema Penyelesaian Sesuai UU Cipta Kerja
			Wilayah Administratif	Kawasan Hutan	Kesesuaian Ruang		
111.	Bulan	Sarpras Wisata	Ds. Gunungsari, Kec. Pamijahan, Kab. Bogor	TN Gunung Halimun Salak		±0,00	Pasal 110 B/Kemitraan Konservasi
112.	Dani	Sarpras Wisata	Ds. Gunungsari, Kec. Pamijahan, Kab. Bogor	TN Gunung Halimun Salak		±0,00	Pasal 110 B/Kemitraan Konservasi
113.	Tony	Sarpras Wisata	Ds. Gunungsari, Kec. Pamijahan, Kab. Bogor	TN Gunung Halimun Salak		±1,00	Pasal 110 B/Kemitraan Konservasi
114.	Agus BIN	Sarpras Wisata	Ds. Gunungsari, Kec. Pamijahan, Kab. Bogor	TN Gunung Halimun Salak		±0,00	Pasal 110 B/Kemitraan Konservasi
115.	Suparman	Sarpras Wisata	Ds. Gunungsari, Kec. Pamijahan, Kab. Bogor	TN Gunung Halimun Salak		±0,00	Pasal 110 B/Kemitraan Konservasi
116.	Idham idris	Sarpras Wisata	Ds. Gunungsari, Kec. Pamijahan, Kab. Bogor	TN Gunung Halimun Salak		±1,00	Pasal 110 B/Kemitraan Konservasi
117.	Rizal Malarangeng	Sarpras Wisata	Ds. Gunungsari, Kec. Pamijahan, Kab. Bogor	TN Gunung Halimun Salak		±9,00	Pasal 110 B/Kemitraan Konservasi

No.	Subyek Hukum	Jenis Kegiatan	Lokasi Kegiatan			Luasan Indikatif Areal Terbuka (Ha)	Skema Penyelesaian Sesuai UU Cipta Kerja
			Wilayah Administratif	Kawasan Hutan	Kesesuaian Ruang		
118.	H. Rahimi	Sarpras Wisata	Ds. Gunungsari, Kec. Pamijahan, Kab. Bogor	TN Gunung Halimun Salak		±15,00	Pasal 110 B/Kemitraan Konservasi
119.	Faisal	Sarpras Wisata	Ds. Gunungsari, Kec. Pamijahan, Kab. Bogor	TN Gunung Halimun Salak		±1,50	Pasal 110 B/Kemitraan Konservasi
120.	Putri,Ayu, Bunga	Sarpras Wisata	Ds. Gunungsari, Kec. Pamijahan, Kab. Bogor	TN Gunung Halimun Salak		±2,00	Pasal 110 B/Kemitraan Konservasi
121.	Amir Machmud	Sarpras Wisata	Ds. Gunungsari, Kec. Pamijahan, Kab. Bogor	TN Gunung Halimun Salak		±1,00	Pasal 110 B/Kemitraan Konservasi
122.	Rindam	Sarpras Wisata	Ds. Gunungsari, Kec. Pamijahan, Kab. Bogor	TN Gunung Halimun Salak		±1,50	Pasal 110 B/Kemitraan Konservasi
123.	Hartono	Sarpras Wisata	Ds. Gunungsari, Kec. Pamijahan, Kab. Bogor	TN Gunung Halimun Salak		±1,50	Pasal 110 B/Kemitraan Konservasi
124.	Asep	Sarpras Wisata	Ds. Gunungsari, Kec. Pamijahan, Kab. Bogor	TN Gunung Halimun Salak		±0,00	Pasal 110 B/Kemitraan Konservasi

No.	Subyek Hukum	Jenis Kegiatan	Lokasi Kegiatan			Luasan Indikatif Areal Terbuka (Ha)	Skema Penyelesaian Sesuai UU Cipta Kerja
			Wilayah Administratif	Kawasan Hutan	Kesesuaian Ruang		
125.	Beni	Sarpras Wisata	Ds. Gunungsari, Kec. Pamijahan, Kab. Bogor	TN Gunung Halimun Salak		±0,10	Pasal 110 B/Kemitraan Konservasi
126.	Tito	Sarpras Wisata	Ds. Gunungsari, Kec. Pamijahan, Kab. Bogor	TN Gunung Halimun Salak		±0,10	Pasal 110 B/Kemitraan Konservasi
127.	Ermanto Nurdin	Sarpras Wisata	Ds. Gunungsari, Kec. Pamijahan, Kab. Bogor	TN Gunung Halimun Salak		±0,50	Pasal 110 B/Kemitraan Konservasi
128.	Ibu Bandi	Sarpras Wisata	Ds. Gunungsari, Kec. Pamijahan, Kab. Bogor	TN Gunung Halimun Salak		±0,20	Pasal 110 B/Kemitraan Konservasi
129.	Maman & Andi	Sarpras Wisata	Ds. Gunungsari, Kec. Pamijahan, Kab. Bogor	TN Gunung Halimun Salak		±0,10	Pasal 110 B/Kemitraan Konservasi
130.	P. Hasan	Sarpras Wisata	Ds. Gunungsari, Kec. Pamijahan, Kab. Bogor	TN Gunung Halimun Salak		±0,50	Pasal 110 B/Kemitraan Konservasi
131.	P. Amir	Sarpras Wisata	Ds. Gunungsari, Kec. Pamijahan, Kab. Bogor	TN Gunung Halimun Salak		±0,10	Pasal 110 B/Kemitraan Konservasi

No.	Subyek Hukum	Jenis Kegiatan	Lokasi Kegiatan			Luasan Indikatif Areal Terbuka (Ha)	Skema Penyelesaian Sesuai UU Cipta Kerja
			Wilayah Administratif	Kawasan Hutan	Kesesuaian Ruang		
132.	Isak Kodang	Sarpras Wisata	Ds. Gunungsari, Kec. Pamijahan, Kab. Bogor	TN Gunung Halimun Salak		±0,10	Pasal 110 B/Kemitraan Konservasi
133.	H. Onden	Sarpras Wisata	Ds. Gunungsari, Kec. Pamijahan, Kab. Bogor	TN Gunung Halimun Salak		±5,00	Pasal 110 B/Kemitraan Konservasi
134.	Yogi	Sarpras Wisata	Ds. Gunungsari, Kec. Pamijahan, Kab. Bogor	TN Gunung Halimun Salak		±0,10	Pasal 110 B/Kemitraan Konservasi
135.	Umar	Sarpras Wisata	Ds. Gunungsari, Kec. Pamijahan, Kab. Bogor	TN Gunung Halimun Salak		±0,20	Pasal 110 B/Kemitraan Konservasi
136.	H. Rosyid	Sarpras Wisata	Ds. Gunungsari, Kec. Pamijahan, Kab. Bogor	TN Gunung Halimun Salak		±0,20	Pasal 110 B/Kemitraan Konservasi
137.	Tomy	Sarpras Wisata	Ds. Gunungsari, Kec. Pamijahan, Kab. Bogor	TN Gunung Halimun Salak		±1,40	Pasal 110 B/Kemitraan Konservasi
138.	Noni	Sarpras Wisata	Ds. Gunungsari, Kec. Pamijahan, Kab. Bogor	TN Gunung Halimun Salak		±0,20	Pasal 110 B/Kemitraan Konservasi

No.	Subyek Hukum	Jenis Kegiatan	Lokasi Kegiatan			Luasan Indikatif Areal Terbuka (Ha)	Skema Penyelesaian Sesuai UU Cipta Kerja
			Wilayah Administratif	Kawasan Hutan	Kesesuaian Ruang		
139.	Aminuddin	Sarpras Wisata	Ds. Gunungsari, Kec. Pamijahan, Kab. Bogor	TN Gunung Halimun Salak		±0,10	Pasal 110 B/Kemitraan Konservasi
140.	Sudharmono	Sarpras Wisata	Ds. Gunungsari, Kec. Pamijahan, Kab. Bogor	TN Gunung Halimun Salak		±1,00	Pasal 110 B/Kemitraan Konservasi
141.	Soekarno	Sarpras Wisata	Ds. Gunungsari, Kec. Pamijahan, Kab. Bogor	TN Gunung Halimun Salak		±0,90	Pasal 110 B/Kemitraan Konservasi
142.	Sundoro/ Jakarta	Sarpras Wisata	Ds. Gunungsari, Kec. Pamijahan, Kab. Bogor	TN Gunung Halimun Salak		±0,20	Pasal 110 B/Kemitraan Konservasi
143.	Parlin / Bekasi	Sarpras Wisata	Ds. Gunungsari, Kec. Pamijahan, Kab. Bogor	TN Gunung Halimun Salak		±0,50	Pasal 110 B/Kemitraan Konservasi
144.	Duduh / Lw liang	Sarpras Wisata	Ds. Gunungsari, Kec. Pamijahan, Kab. Bogor	TN Gunung Halimun Salak		±0,50	Pasal 110 B/Kemitraan Konservasi
145.	Didi / Ciputat	Sarpras Wisata	Ds. Gunungsari, Kec. Pamijahan, Kab. Bogor	TN Gunung Halimun Salak		±0,00	Pasal 110 B/Kemitraan Konservasi

No.	Subyek Hukum	Jenis Kegiatan	Lokasi Kegiatan			Luasan Indikatif Areal Terbuka (Ha)	Skema Penyelesaian Sesuai UU Cipta Kerja
			Wilayah Administratif	Kawasan Hutan	Kesesuaian Ruang		
146.	H. diran / Jakarta	Sarpras Wisata	Ds. Gunungsari, Kec. Pamijahan, Kab. Bogor	TN Gunung Halimun Salak		±1,00	Pasal 110 B/Kemitraan Konservasi
147.	Engko / Pribumi	Sarpras Wisata	Ds. Gunungsari, Kec. Pamijahan, Kab. Bogor	TN Gunung Halimun Salak		±0,20	Pasal 110 B/Kemitraan Konservasi
148.	Suharyani	Sarpras Wisata	Ds. Gunungsari, Kec. Pamijahan, Kab. Bogor	TN Gunung Halimun Salak		±0,30	Pasal 110 B/Kemitraan Konservasi
149.	Fara maerani	Sarpras Wisata	Ds. Gunungsari, Kec. Pamijahan, Kab. Bogor	TN Gunung Halimun Salak		±0,60	Pasal 110 B/Kemitraan Konservasi
150.	H.Iyan	Sarpras Wisata	Ds. Gunungsari, Kec. Pamijahan, Kab. Bogor	TN Gunung Halimun Salak		±3,00	Pasal 110 B/Kemitraan Konservasi
151.	Herman	Sarpras Wisata	Ds. Gunungsari, Kec. Pamijahan, Kab. Bogor	TN Gunung Halimun Salak		±0,50	Pasal 110 B/Kemitraan Konservasi
152.	Handoko	Sarpras Wisata	Ds. Gunungsari, Kec. Pamijahan, Kab. Bogor	TN Gunung Halimun Salak		±0,20	Pasal 110 B/Kemitraan Konservasi

No.	Subyek Hukum	Jenis Kegiatan	Lokasi Kegiatan			Luasan Indikatif Areal Terbuka (Ha)	Skema Penyelesaian Sesuai UU Cipta Kerja
			Wilayah Administratif	Kawasan Hutan	Kesesuaian Ruang		
153.	Salman Mukhtar	Sarpras Wisata	Ds. Gunungsari, Kec. Pamijahan, Kab. Bogor	TN Gunung Halimun Salak		±4,50	Pasal 110 B/Kemitraan Konservasi
154.	Uci	Sarpras Wisata	Ds. Gunungsari, Kec. Pamijahan, Kab. Bogor	TN Gunung Halimun Salak		±2,00	Pasal 110 B/Kemitraan Konservasi
155.	Yuli	Sarpras Wisata	Ds. Gunungsari, Kec. Pamijahan, Kab. Bogor	TN Gunung Halimun Salak		±0,10	Pasal 110 B/Kemitraan Konservasi
156.	Villa Idong	Sarpras Wisata	Ds. Gunungsari, Kec. Pamijahan, Kab. Bogor	TN Gunung Halimun Salak		±0,20	Pasal 110 B/Kemitraan Konservasi
157.	Gilang Ramadhan (1)	Sarpras Wisata	Ds. Gunungsari, Kec. Pamijahan, Kab. Bogor	TN Gunung Halimun Salak		±0,10	Pasal 110 B/Kemitraan Konservasi
158.	Gilang Ramadhan (2)	Sarpras Wisata	Ds. Gunungsari, Kec. Pamijahan, Kab. Bogor	TN Gunung Halimun Salak		±0,10	Pasal 110 B/Kemitraan Konservasi
159.	Gilang Ramadhan (3)	Sarpras Wisata	Ds. Gunungsari, Kec. Pamijahan, Kab. Bogor	TN Gunung Halimun Salak		±0,10	Pasal 110 B/Kemitraan Konservasi

No.	Subyek Hukum	Jenis Kegiatan	Lokasi Kegiatan			Luasan Indikatif Areal Terbuka (Ha)	Skema Penyelesaian Sesuai UU Cipta Kerja
			Wilayah Administratif	Kawasan Hutan	Kesesuaian Ruang		
160.	Amat (1)	Sarpras Wisata	Ds. Gunungsari, Kec. Pamijahan, Kab. Bogor	TN Gunung Halimun Salak		±0,00	Pasal 110 B/Kemitraan Konservasi
161.	Amat (2)	Sarpras Wisata	Ds. Gunungsari, Kec. Pamijahan, Kab. Bogor	TN Gunung Halimun Salak		±0,10	Pasal 110 B/Kemitraan Konservasi
162.	Acong	Sarpras Wisata	Ds. Gunungsari, Kec. Pamijahan, Kab. Bogor	TN Gunung Halimun Salak		±0,00	Pasal 110 B/Kemitraan Konservasi
163.	H.Solehudin	Sarpras Wisata	Ds. Gunungsari, Kec. Pamijahan, Kab. Bogor	TN Gunung Halimun Salak		±0,20	Pasal 110 B/Kemitraan Konservasi
164.	Titik	Sarpras Wisata	Ds. Gunungsari, Kec. Pamijahan, Kab. Bogor	TN Gunung Halimun Salak		±2,00	Pasal 110 B/Kemitraan Konservasi
165.	Amat (3)	Sarpras Wisata	Ds. Gunungsari, Kec. Pamijahan, Kab. Bogor	TN Gunung Halimun Salak		±0,00	Pasal 110 B/Kemitraan Konservasi
166.	Amat (4)	Sarpras Wisata	Ds. Gunungsari, Kec. Pamijahan, Kab. Bogor	TN Gunung Halimun Salak		±0,00	Pasal 110 B/Kemitraan Konservasi

No.	Subyek Hukum	Jenis Kegiatan	Lokasi Kegiatan			Luasan Indikatif Areal Terbuka (Ha)	Skema Penyelesaian Sesuai UU Cipta Kerja
			Wilayah Administratif	Kawasan Hutan	Kesesuaian Ruang		
167.	Vanesa	Sarpras Wisata	Ds. Gunungsari, Kec. Pamijahan, Kab. Bogor	TN Gunung Halimun Salak		±0,00	Pasal 110 B/Kemitraan Konservasi
168.	Bambang /Jakarta (1)	Sarpras Wisata	Ds. Gunungsari, Kec. Pamijahan, Kab. Bogor	TN Gunung Halimun Salak		±0,10	Pasal 110 B/Kemitraan Konservasi
169.	Budiana	Sarpras Wisata	Ds. Gunungsari, Kec. Pamijahan, Kab. Bogor	TN Gunung Halimun Salak		±0,10	Pasal 110 B/Kemitraan Konservasi
170.	H.Muhamad	Sarpras Wisata	Ds. Gunungsari, Kec. Pamijahan, Kab. Bogor	TN Gunung Halimun Salak		±0,20	Pasal 110 B/Kemitraan Konservasi
171.	H.Maryati	Sarpras Wisata	Ds. Gunungsari, Kec. Pamijahan, Kab. Bogor	TN Gunung Halimun Salak		±0,20	Pasal 110 B/Kemitraan Konservasi
172.	Endang	Sarpras Wisata	Ds. Gunungsari, Kec. Pamijahan, Kab. Bogor	TN Gunung Halimun Salak		±0,10	Pasal 110 B/Kemitraan Konservasi
173.	Salmin	Sarpras Wisata	Ds. Gunungsari, Kec. Pamijahan, Kab. Bogor	TN Gunung Halimun Salak		±0,10	Pasal 110 B/Kemitraan Konservasi

No.	Subyek Hukum	Jenis Kegiatan	Lokasi Kegiatan			Luasan Indikatif Areal Terbuka (Ha)	Skema Penyelesaian Sesuai UU Cipta Kerja
			Wilayah Administratif	Kawasan Hutan	Kesesuaian Ruang		
174.	Rohili	Sarpras Wisata	Ds. Gunungsari, Kec. Pamijahan, Kab. Bogor	TN Gunung Halimun Salak		±0,00	Pasal 110 B/Kemitraan Konservasi
175.	Toto	Sarpras Wisata	Ds. Gunungsari, Kec. Pamijahan, Kab. Bogor	TN Gunung Halimun Salak		±0,00	Pasal 110 B/Kemitraan Konservasi
176.	Ace Ongky	Sarpras Wisata	Ds. Gunungsari, Kec. Pamijahan, Kab. Bogor	TN Gunung Halimun Salak		±0,20	Pasal 110 B/Kemitraan Konservasi
177.	Henry Setiani	Sarpras Wisata	Ds. Gunungsari, Kec. Pamijahan, Kab. Bogor	TN Gunung Halimun Salak		±0,00	Pasal 110 B/Kemitraan Konservasi
178.	Ibung	Sarpras Wisata	Ds. Gunungsari, Kec. Pamijahan, Kab. Bogor	TN Gunung Halimun Salak		±2,00	Pasal 110 B/Kemitraan Konservasi
179.	H.Bambang widodo	Sarpras Wisata	Ds. Gunungsari, Kec. Pamijahan, Kab. Bogor	TN Gunung Halimun Salak		±0,20	Pasal 110 B/Kemitraan Konservasi
180.	Iwan	Sarpras Wisata	Ds. Gunungsari, Kec. Pamijahan, Kab. Bogor	TN Gunung Halimun Salak		±0,60	Pasal 110 B/Kemitraan Konservasi

No.	Subyek Hukum	Jenis Kegiatan	Lokasi Kegiatan			Luasan Indikatif Areal Terbuka (Ha)	Skema Penyelesaian Sesuai UU Cipta Kerja
			Wilayah Administratif	Kawasan Hutan	Kesesuaian Ruang		
181.	Nata	Sarpras Wisata	Ds. Gunungsari, Kec. Pamijahan, Kab. Bogor	TN Gunung Halimun Salak		±0,20	Pasal 110 B/Kemitraan Konservasi
182.	Ida	Sarpras Wisata	Ds. Gunungsari, Kec. Pamijahan, Kab. Bogor	TN Gunung Halimun Salak		±0,50	Pasal 110 B/Kemitraan Konservasi
183.	Linda	Sarpras Wisata	Ds. Gunungsari, Kec. Pamijahan, Kab. Bogor	TN Gunung Halimun Salak		±5,00	Pasal 110 B/Kemitraan Konservasi
184.	H.Syahril	Sarpras Wisata	Ds. Gunungsari, Kec. Pamijahan, Kab. Bogor	TN Gunung Halimun Salak		±0,10	Pasal 110 B/Kemitraan Konservasi
185.	Lukman	Sarpras Wisata	Ds. Gunungsari, Kec. Pamijahan, Kab. Bogor	TN Gunung Halimun Salak		±0,00	Pasal 110 B/Kemitraan Konservasi
186.	Bambang /Jakarta (2)	Sarpras Wisata	Ds. Gunungsari, Kec. Pamijahan, Kab. Bogor	TN Gunung Halimun Salak		±0,10	Pasal 110 B/Kemitraan Konservasi
187.	Ismail	Sarpras Wisata	Ds. Gunungsari, Kec. Pamijahan, Kab. Bogor	TN Gunung Halimun Salak		±0,50	Pasal 110 B/Kemitraan Konservasi

No.	Subyek Hukum	Jenis Kegiatan	Lokasi Kegiatan			Luasan Indikatif Areal Terbuka (Ha)	Skema Penyelesaian Sesuai UU Cipta Kerja
			Wilayah Administratif	Kawasan Hutan	Kesesuaian Ruang		
188.	Herdi	Sarpras Wisata	Ds. Gunungsari, Kec. Pamijahan, Kab. Bogor	TN Gunung Halimun Salak		±0,20	Pasal 110 B/Kemitraan Konservasi
189.	Tono	Sarpras Wisata	Ds. Gunungsari, Kec. Pamijahan, Kab. Bogor	TN Gunung Halimun Salak		±5,00	Pasal 110 B/Kemitraan Konservasi
190.	Alex (1)	Sarpras Wisata	Ds. Gunungsari, Kec. Pamijahan, Kab. Bogor	TN Gunung Halimun Salak		±0,00	Pasal 110 B/Kemitraan Konservasi
191.	H.Epong	Sarpras Wisata	Ds. Gunungsari, Kec. Pamijahan, Kab. Bogor	TN Gunung Halimun Salak		±0,10	Pasal 110 B/Kemitraan Konservasi
192.	Dadi (1)	Sarpras Wisata	Ds. Gunungsari, Kec. Pamijahan, Kab. Bogor	TN Gunung Halimun Salak		±0,10	Pasal 110 B/Kemitraan Konservasi
193.	Dandan	Sarpras Wisata	Ds. Gunungsari, Kec. Pamijahan, Kab. Bogor	TN Gunung Halimun Salak		±0,10	Pasal 110 B/Kemitraan Konservasi
194.	H.Iwan (1)	Sarpras Wisata	Ds. Gunungsari, Kec. Pamijahan, Kab. Bogor	TN Gunung Halimun Salak		±0,00	Pasal 110 B/Kemitraan Konservasi

No.	Subyek Hukum	Jenis Kegiatan	Lokasi Kegiatan			Luasan Indikatif Areal Terbuka (Ha)	Skema Penyelesaian Sesuai UU Cipta Kerja
			Wilayah Administratif	Kawasan Hutan	Kesesuaian Ruang		
195.	Pemda bogor	Sarpras Wisata	Ds. Gunungsari, Kec. Pamijahan, Kab. Bogor	TN Gunung Halimun Salak		±0,00	Pasal 110 B/Kemitraan Konservasi
196.	Tisna	Sarpras Wisata	Ds. Gunungsari, Kec. Pamijahan, Kab. Bogor	TN Gunung Halimun Salak		±1,00	Pasal 110 B/Kemitraan Konservasi
197.	Alex (2)	Sarpras Wisata	Ds. Gunungsari, Kec. Pamijahan, Kab. Bogor	TN Gunung Halimun Salak		±0,00	Pasal 110 B/Kemitraan Konservasi
198.	Dadi (2)	Sarpras Wisata	Ds. Gunungsari, Kec. Pamijahan, Kab. Bogor	TN Gunung Halimun Salak		±0,00	Pasal 110 B/Kemitraan Konservasi
199.	H.Unang	Sarpras Wisata	Ds. Gunungsari, Kec. Pamijahan, Kab. Bogor	TN Gunung Halimun Salak		±0,30	Pasal 110 B/Kemitraan Konservasi
200.	H.Iwan (2)	Sarpras Wisata	Ds. Gunungsari, Kec. Pamijahan, Kab. Bogor	TN Gunung Halimun Salak		±0,30	Pasal 110 B/Kemitraan Konservasi
201.	Kana	Sarpras Wisata	Ds. Gunungsari, Kec. Pamijahan, Kab. Bogor	TN Gunung Halimun Salak		±2,00	Pasal 110 B/Kemitraan Konservasi

No.	Subyek Hukum	Jenis Kegiatan	Lokasi Kegiatan			Luasan Indikatif Areal Terbuka (Ha)	Skema Penyelesaian Sesuai UU Cipta Kerja
			Wilayah Administratif	Kawasan Hutan	Kesesuaian Ruang		
202.	Maidel Afsani	Sarpras Wisata	Ds. Singgalang, Kec. X Koto, Kab. Tanah	TWA Mega Mendung		±1,00	Pasal 110 B/Kemitraan Konservasi
203.	Asrinal	Sarpras Wisata	Ds. Singgalang, Kec. X Koto, Kab. Tanah	TWA Mega Mendung		±1,10	Pasal 110 B/Kemitraan Konservasi
204.	Amril	Sarpras Wisata	Ds. Singgalang, Kec. X Koto, Kab. Tanah	TWA Mega Mendung		±1,30	Pasal 110 B/Kemitraan Konservasi
205.	Resti Amelia	Sarpras Wisata	Ds. Singgalang, Kec. X Koto, Kab. Tanah	TWA Mega Mendung		±2,00	Pasal 110 B/Kemitraan Konservasi
206.	Nofrianto	Sarpras Wisata	Ds. Singgalang, Kec. X Koto, Kab. Tanah	TWA Mega Mendung		±0,20	Pasal 110 B/Kemitraan Konservasi
207.	Novrita Devira	Sarpras Wisata	Ds. Singgalang, Kec. X Koto, Kab. Tanah	TWA Mega Mendung		±0,20	Pasal 110 B/Kemitraan Konservasi
208.	Eri	Sarpras Wisata	Ds. Singgalang, Kec. X Koto, Kab. Tanah	TWA Mega Mendung		±1,20	Pasal 110 B/Kemitraan Konservasi
209.	Zulkifli	Sarpras Wisata	Ds. Singgalang, Kec. X Koto, Kab. Tanah	TWA Mega Mendung		±0,30	Pasal 110 B/Kemitraan Konservasi
210.	Darman Setiawan	Sarpras Wisata	Ds. Singgalang, Kec. X Koto, Kab. Tanah	TWA Mega Mendung		±1,00	Pasal 110 B/Kemitraan Konservasi

No.	Subyek Hukum	Jenis Kegiatan	Lokasi Kegiatan			Luasan Indikatif Areal Terbuka (Ha)	Skema Penyelesaian Sesuai UU Cipta Kerja
			Wilayah Administratif	Kawasan Hutan	Kesesuaian Ruang		
211.	Bakti Kominfo Region Banten (2 Site ID)	Pembangunan Base Transceiver Station (BTS)	Provinsi Banten	HK		±0,04	Pasal 110 B
212.	Bakti Kominfo Region Kalimantan Barat (16 Site ID)	Pembangunan Base Transceiver Station (BTS)	Provinsi Kalimantan Barat	HK, HL, HP		±0,32	Pasal 110 B
213.	Bakti Kominfo Region Kalimantan Tengah (6 Site ID)	Pembangunan Base Transceiver Station (BTS)	Provinsi Kalimantan Tengah	HP		±0,12	Pasal 110 B
214.	Bakti Kominfo Region Kalimantan Utara (2 Site ID)	Pembangunan Base Transceiver Station (BTS)	Provinsi Kalimantan Utara	HP		±0,04	Pasal 110 B
215.	Bakti Kominfo Region Kepulauan Riau (1 Site ID)	Pembangunan Base Transceiver Station (BTS)	Provinsi Kepulauan Riau	HP		±0,02	Pasal 110 B
216.	Bakti Kominfo Region Maluku (5 Site ID)	Pembangunan Base Transceiver Station (BTS)	Provinsi Maluku	HK, HL, HP		±0,10	Pasal 110 B
217.	Bakti Kominfo Region Maluku Utara (2 Site ID)	Pembangunan Base Transceiver Station (BTS)	Provinsi Maluku Utara	HP		±0,04	Pasal 110 B
218.	Bakti Kominfo Region Nusa Tenggara Timur (4 Site ID)	Pembangunan Base Transceiver Station (BTS)	Provinsi Nusa Tenggara Timur	HK, HL		±0,08	Pasal 110 B

No.	Subyek Hukum	Jenis Kegiatan	Lokasi Kegiatan			Luasan Indikatif Areal Terbuka (Ha)	Skema Penyelesaian Sesuai UU Cipta Kerja
			Wilayah Administratif	Kawasan Hutan	Kesesuaian Ruang		
219.	Bakti Kominfo Region Papua (10 Site ID)	Pembangunan Base Transceiver Station (BTS)	Provinsi Papua	HK, HP		±0,20	Pasal 110 B
220.	Bakti Kominfo Region Papua Barat (55 Site ID)	Pembangunan Base Transceiver Station (BTS)	Provinsi Papua Barat	HK, HL, HP		±1,10	Pasal 110 B
221.	Bakti Kominfo Region Papua Barat Daya (18 Site ID)	Pembangunan Base Transceiver Station (BTS)	Provinsi Papua Barat Daya	HL, HP		±0,36	Pasal 110 B
222.	Bakti Kominfo Region Papua Pegunungan (4 Site ID)	Pembangunan Base Transceiver Station (BTS)	Provinsi Papua Pegunungan	HL, HP		±0,08	Pasal 110 B
223.	Bakti Kominfo Region Papua Selatan (7 Site ID)	Pembangunan Base Transceiver Station (BTS)	Provinsi Papua Selatan	HP		±0,14	Pasal 110 B
224.	Bakti Kominfo Region Sumatera Barat (8 Site ID)	Pembangunan Base Transceiver Station (BTS)	Provinsi Sumatera Barat	HK, HP		±0,16	Pasal 110 B
225.	Bakti Kominfo Region Sumatera Utara (10 Site ID)	Pembangunan Base Transceiver Station (BTS)	Provinsi Sumatera Utara	HL, HP		±0,20	Pasal 110 B
226.	As'ari	Penguasaan Tanah	Dusun Telo, Muara Uwai, Kec. Bangkinang, Kab. Kampar, Riau	HPK		±3,86	Pasal 110 B/Penataan Kawasan Hutan

No.	Subyek Hukum	Jenis Kegiatan	Lokasi Kegiatan			Luasan Indikatif Areal Terbuka (Ha)	Skema Penyelesaian Sesuai UU Cipta Kerja
			Wilayah Administratif	Kawasan Hutan	Kesesuaian Ruang		
227.	Chusairi (KUD Karta Maharja)	Penguasaan Tanah	Bukit Lembah Subur, Desa Bukit Lembah Subur, Kec. Kerumutan, Kab. Pelalawan, Riau	HPK		±8,49	Pasal 110 B/Penataan Kawasan Hutan
228.	Hakim Ritonga	Penguasaan Tanah	Telayap, Desa Telayap, Kec. Pelalawan, Kab. Pelalawan, Riau	HP, HPK		±501,81	Pasal 110 B/Penataan Kawasan Hutan
229.	Heru Susanto	Penguasaan Tanah	Desa Air Dingin, Kec. Bukit Raya, Kota Pekanbaru, Riau	HPT		±84,13	Pasal 110 B/Penataan Kawasan Hutan
230.	Hotma Elfrida E	Penguasaan Tanah	Desa Delima, Kec. Tampan, Kota Pekanbaru, Riau	HP		±10,91	Pasal 110 B/Penataan Kawasan Hutan
231.	Poniran	Penguasaan Tanah	Desa Delima Jaya, Kabupaten Siak, Riau	HP		±36,27	Pasal 110 B/Penataan Kawasan Hutan
232.	Rizki Nur Rezeki	Penguasaan Tanah	Dusun Beringin Jaya, Desa Simpang Beringin, Kec. Bandar Seikijang, Kab. Pelalawan, Riau	HP		±42,73	Pasal 110 B/Penataan Kawasan Hutan
233.	Rosevel T Kennedy	Penguasaan Tanah	Desa Tobekgodang, Kec. Tampan, Kota Pekanbaru, Riau	HPT		±43,15	Pasal 110 B/Penataan Kawasan Hutan
234.	Ruth Novida (PT Telangkaindo Permai)	Penguasaan Tanah	Kelurahan Kota Tinggi, Kec. Pekanbaru Kota, Pekanbaru, Riau	HPT		±355,27	Pasal 110 B/Penataan Kawasan Hutan

No.	Subyek Hukum	Jenis Kegiatan	Lokasi Kegiatan			Luasan Indikatif Areal Terbuka (Ha)	Skema Penyelesaian Sesuai UU Cipta Kerja
			Wilayah Administratif	Kawasan Hutan	Kesesuaian Ruang		
235.	Erwin Susanto	Penguasaan Tanah	Kel. Sidorame Barat 1, Kec. Medan Perjuangan, Kota Batam, Sumatera Utara	HPT		±226,90	Pasal 110 B/ Penataan Kawasan Hutan
236.	Ernaldy Aprianto	Penguasaan Tanah	Kel. Simpang Baru, Kec. Tampan, Kota Pekanbaru, Riau	HPT		±68,03	Pasal 110 B/ Penataan Kawasan Hutan
237.	Selamat Ariadi	Penguasaan Tanah	Desa Segati, Kec. Langgam, Kab. Pelawan, Riau	HPT		±57,69	Pasal 110 B/ Penataan Kawasan Hutan
238.	Desa Melibur	Perkebunan Kelapa Sawit	Desa Melibur, Kec. Muandau, Kab. Bengkalis, Riau	HP		±1.023,76	Pasal 110 B/ Penataan Kawasan Hutan
239.	Diana Fauzia Mawardi	Penguasaan Tanah	Desa Balai Makam, Kec. Bathin Solapan, Kab. Bengkalis, Riau	HPK		±2,14	Pasal 110 B/ Penataan Kawasan Hutan
240.	Gunawan	Penguasaan Tanah	Sumetara Selatan	HL		±6,11	Pasal 110 B/ Penataan Kawasan Hutan
241.	Harmono Japonika, SH	Penguasaan Tanah	Desa Pematang Cengal, Kec. Tanjungpura, Kab. Langkat, Sumatera Utara	HP		±109,94	Pasal 110 B/ Penataan Kawasan Hutan
242.	Jammaludin, dkk	Penguasaan Tanah	Desa Sungai Rambai, Kec. Kampar Kiri, Kab. Kampar, Riau	HPT		±36,50	Pasal 110 B/ Penataan Kawasan Hutan

No.	Subyek Hukum	Jenis Kegiatan	Lokasi Kegiatan			Luasan Indikatif Areal Terbuka (Ha)	Skema Penyelesaian Sesuai UU Cipta Kerja
			Wilayah Administratif	Kawasan Hutan	Kesesuaian Ruang		
243.	KT Bina Mandiri	Penguasaan Tanah	Kec. Lunang, Kab. Pesisir Selatan, Sumatera Barat	HPK		±3.368,00	Pasal 110 B/Penataan Kawasan Hutan
244.	Desa Pantai Bakti	Permukiman dan Tambak	Desa Pantai Bakti, Kec. Muaragembong, Kab. Bekasi	HL, HP, APL		±2.599,50	Pasal 110 B/Penataan Kawasan Hutan
245.	Rika	Penguasaan Tanah	Kelurahan Tanjung Uban Selatan, Kec. Bintan Utara, Kab. Bintan, Kepulauan Riau	HPT		±1,21	Pasal 110 B/Penataan Kawasan Hutan
246.	Suhardi	Penguasaan Tanah	Kelurahan Tanjung Uban Selatan, Kec. Bintan Utara, Kab. Bintan, Kepulauan Riau	HPT		±0,70	Pasal 110 B/Penataan Kawasan Hutan
247.	Suherman Siregar	Perkebunan Kelapa Sawit	Desa Boncah Mahang, Kec. Bathin Solapan, Kab. Bengkalis, Riau	HP, HPK		±291,85	Pasal 110 B/Penataan Kawasan Hutan
248.	Vriks Hamonangan Purba dkk	Penguasaan Tanah	Desa Inuman, Kec. Hulu Kuantan, Kab. Kuantan Singingi, Riau	HPT		±25,52	Pasal 110 B/Penataan Kawasan Hutan
249.	Aris Purba dkk	Penguasaan Tanah	Dusun Mak Kaib, Kampung Mandiangin, Kec. Minas, Kab. Siak, Riau	HP		±2.474,57	Pasal 110 B/Penataan Kawasan Hutan
250.	Marjilah	Penguasaan Tanah	Desa Laboy Jaya, Kec. Bangkinang Seberang, Kab. Kampar, Riau	HPT		±1,04	Pasal 110 B/Penataan Kawasan Hutan

No.	Subyek Hukum	Jenis Kegiatan	Lokasi Kegiatan			Luasan Indikatif Areal Terbuka (Ha)	Skema Penyelesaian Sesuai UU Cipta Kerja
			Wilayah Administratif	Kawasan Hutan	Kesesuaian Ruang		
251.	Ferdianto	Penguasaan Tanah	Riau	HL		±3,88	Pasal 110 B/Penataan Kawasan Hutan
252.	Joni Setiawan dkk	Penguasaan Tanah	Riau	HPT, HPK		±135,94	Pasal 110 B/Penataan Kawasan Hutan
253.	Edi Basri	Penguasaan Tanah	Riau	HP		±24,96	Pasal 110 B/Penataan Kawasan Hutan
254.	KUD Setia Tani	Penguasaan Tanah	Riau	HP		±896,25	Pasal 110 B/Penataan Kawasan Hutan
255.	Risda Pakpahan, dkk	Penguasaan Tanah	Riau	HPK		±41,92	Pasal 110 B/Penataan Kawasan Hutan
256.	Lee Lee	Penguasaan Tanah	Riau	HP, HPK		±2,65	Pasal 110 B/Penataan Kawasan Hutan
257.	Liawati	Penguasaan Tanah	Riau	HP, HPK		±269,38	Pasal 110 B/Penataan Kawasan Hutan
258.	Bambang Listijono	Penguasaan Tanah	Riau	HPT		±68,60	Pasal 110 B/Penataan Kawasan Hutan
259.	Ahmad Sunardi	Penguasaan Tanah	Riau	HP		±443,97	Pasal 110 B/Penataan Kawasan Hutan
260.	Boymir, dkk	Penguasaan Tanah	Riau	HP		±9,41	Pasal 110 B/Penataan Kawasan Hutan
261.	Desina Ervina, dkk	Penguasaan Tanah	Riau	HP		±151,65	Pasal 110 B/Penataan Kawasan Hutan
262.	KT Ternak Idaman	Penguasaan Tanah	Riau	HPK		±190,90	Pasal 110 B/Penataan Kawasan Hutan
263.	Sampang Sitepu	Penguasaan Tanah	Riau	HPT		±51,05	Pasal 110 B/Penataan Kawasan Hutan

No.	Subyek Hukum	Jenis Kegiatan	Lokasi Kegiatan			Luasan Indikatif Areal Terbuka (Ha)	Skema Penyelesaian Sesuai UU Cipta Kerja
			Wilayah Administratif	Kawasan Hutan	Kesesuaian Ruang		
264.	Denis Tjandra, dkk	Penguasaan Tanah	Kalimantan Selatan	HPK		±201,06	Pasal 110 B/Penataan Kawasan Hutan
265.	Darwin	Penguasaan Tanah	Sumatera Utara	HP		±54,40	Pasal 110 B/Penataan Kawasan Hutan
266.	Dona Abel Siregar	Penguasaan Tanah	Sumatera Utara	HPK		±56,71	Pasal 110 B/Penataan Kawasan Hutan
267.	Evalina Gultom, dkk	Penguasaan Tanah	Sumatera Utara	HPK		±36,31	Pasal 110 B/Penataan Kawasan Hutan
268.	Ir. Wasman	Penguasaan Tanah	Sumatera Utara	HPK		±110,43	Pasal 110 B/Penataan Kawasan Hutan
269.	Keman	Penguasaan Tanah	Sumatera Utara	HPK		±23,74	Pasal 110 B/Penataan Kawasan Hutan
270.	Masyarakat Ex Humada	Penguasaan Tanah	Sumatera Utara	HPK		±498,13	Pasal 110 B/Penataan Kawasan Hutan
271.	Morison Ginting	Penguasaan Tanah	Sumatera Utara	HP,HPK		±274,53	Pasal 110 B/Penataan Kawasan Hutan
272.	Nur Said	Penguasaan Tanah	Sumatera Utara	HP, HPK		±74,18	Pasal 110 B/Penataan Kawasan Hutan
273.	Patumona Sormin	Penguasaan Tanah	Sumatera Utara	HP, HPK		±216,12	Pasal 110 B/Penataan Kawasan Hutan
274.	Sahala Mulop Sormin	Penguasaan Tanah	Sumatera Utara	HPK		±50,81	Pasal 110 B/Penataan Kawasan Hutan
275.	Said Yusuf	Penguasaan Tanah	Sumatera Utara	HPK		±57,13	Pasal 110 B/Penataan Kawasan Hutan
276.	Budi Hartono, dkk	Penguasaan Tanah	Sumatera Utara	HPK		±107,00	Pasal 110 B/Penataan Kawasan Hutan

No.	Subyek Hukum	Jenis Kegiatan	Lokasi Kegiatan			Luasan Indikatif Areal Terbuka (Ha)	Skema Penyelesaian Sesuai UU Cipta Kerja
			Wilayah Administratif	Kawasan Hutan	Kesesuaian Ruang		
277.	Gapoktan Mandiri Jaya	Penguasaan Tanah	Sumatera Selatan dan Lampung	HP		±1.189,07	Pasal 110 B/Penataan Kawasan Hutan
278.	Gapoktan Jaya Dharma	Penguasaan Tanah	Sumatera Selatan dan Lampung	HP		±4.072,01	Pasal 110 B/Penataan Kawasan Hutan
279.	Bupati Dharmasraya a.n. Masyarakat	Penguasaan Tanah	Kabupaten Dharmasraya	HPK		±5.568,00	Pasal 110 B/Penataan Kawasan Hutan
280.	Kepala Desa Talagawangi	Penguasaan Tanah	Kab. Garut, Jawa Barat	HL		±12,75	Pasal 110 B/Penataan Kawasan Hutan
281.	Permata Putera Mandiri, PT	Terminal Khusus	Kab. Sorong Selatan, Papua Barat	HPK		±1,94	Pasal 110 B
282.	Bupati Pesisir Barat	Jalan	Kab. Pesisir Barat, Lampung	HPT		±1,43	Pasal 110 B
283.	Baladano 2 (PT Tower Bersama)	Menara Telekomunikasi	Desa Boladano, Kec. Ma'u, Kabupaten Nias, Sumatera Utara	HL		±0,04	Pasal 110 B
284.	Putra Daerah Interland, PT	Pengembangan Permukiman	Kota Batam, Kepulauan Riau	HL		±5,06	Pasal 110 B
285.	Gubernur Maluku Utara	Jalan Wai Bau - Malbufo	Kab. Kepulauan Sula, Maluku Utara	HL, HP		±5,68	Pasal 110 B
286.	Rimba Kurnia Alam, PT	Stockpile dan Sarpras	Kec Obi Kab Halmahera Selatan	HPK		±9,49	Pasal 110 B
287.	Mitra Karya Agung, PT	Pertambangan	Kabupaten Morowali	HP		±20,99	Pasal 110 B
288.	Koko Chandra	Perkebunan Kelapa Sawit	Desa Buluh Apo Kec Pinggir Kab Bengkalis	HK (SM Balai Raja)		±113	

No.	Subyek Hukum	Jenis Kegiatan	Lokasi Kegiatan			Luasan Indikatif Areal Terbuka (Ha)	Skema Penyelesaian Sesuai UU Cipta Kerja
			Wilayah Administratif	Kawasan Hutan	Kesesuaian Ruang		
289.	Armin	Perkebunan Kelapa Sawit	Desa Buluh Apo Kec Pinggir Kab Bengkalis	HK (SM Balai Raja)		±156	Pasal 110 B
290.	KTH Pelangi Wanatirta Sembulang	Perkebunan Kelapa Sawit	Kelurahan Sembulang Kec Galang Kota Batam	HK (Taman Buru Pulau Rempang)		±6	Pasal 110 B
291.	KT Bantur Raya	Perkebunan sawit rakyat dalam kawasan hutan	Kab. Kotawaringin Timur Kec. Mentaya Hulu Desa Tanjung Bantur	HPK		±45	Pasal 110 B/Perhutanan Sosial
292.	KT Habaring Hurung	Perkebunan sawit rakyat dalam kawasan hutan	Kab. Kotawaringin Timur Kec. Mentaya Hulu Desa Kelurahan Kuala Luayan	HPK		±47	Pasal 110 B/Perhutanan Sosial
293.	KT Maju Bersama (Desa Kawan Batu)	Perkebunan sawit rakyat dalam kawasan hutan	Kab. Kotawaringin Timur Kec. Mentaya Hulu Desa Kawan Batu	HPK		±48	Pasal 110 B/Perhutanan Sosial
294.	KT Maju Bersama (Desa Parahirangan)	Perkebunan sawit rakyat dalam kawasan hutan	Kab. Kotawaringin Timur Kec. Mentaya Hulu Desa Pahirangan	HPK		±51	Pasal 110 B/Perhutanan Sosial
295.	KT Maju Bersama (Kelurahan Kuala Kuayan)	Perkebunan sawit rakyat dalam kawasan hutan	Kab. Kotawaringin Timur Kec. Mentaya Hulu Desa Kelurahan Kuala Kuayan	HPK		±38	Pasal 110 B/Perhutanan Sosial
296.	KT Manunggal Tekat	Perkebunan sawit rakyat dalam kawasan hutan	Kab. Kotawaringin Timur Kec. Mentaya Hulu Desa Tangar	HP, HPK		±74	Pasal 110 B/Perhutanan Sosial

No.	Subyek Hukum	Jenis Kegiatan	Lokasi Kegiatan			Luasan Indikatif Areal Terbuka (Ha)	Skema Penyelesaian Sesuai UU Cipta Kerja
			Wilayah Administratif	Kawasan Hutan	Kesesuaian Ruang		
297.	KT Perjuangan	Perkebunan sawit rakyat dalam kawasan hutan	Kab. Kotawaringin Timur Kec. Mentaya Hulu Desa Pantap	HP		±127	Pasal 110 B/Perhutanan Sosial
298.	KT Perjuangan I	Perkebunan sawit rakyat dalam kawasan hutan	Kab. Kotawaringin Timur Kec. Mentaya Hulu Desa Pantap	HPT, HP, HPK		±62	Pasal 110 B/Perhutanan Sosial
299.	KT Saluang	Perkebunan sawit rakyat dalam kawasan hutan	Kab. Kotawaringin Timur Kec. Mentaya Hulu Desa Kuala Kuayan	HPK		±104	Pasal 110 B/Perhutanan Sosial
300.	KT Sei Kawang	Perkebunan sawit rakyat dalam kawasan hutan	Kab. Kotawaringin Timur Kec. Mentaya Hulu Desa Kuala Kuayan	HPK		±120	Pasal 110 B/Perhutanan Sosial
301.	KT Sei Keruh Jaya	Perkebunan sawit rakyat dalam kawasan hutan	Kab. Kotawaringin Timur Kec. Mentaya Hulu Desa Bawan	HPK		±255	Pasal 110 B/Perhutanan Sosial
302.	KT Sei Keruh Jaya II	Perkebunan sawit rakyat dalam kawasan hutan	Kab. Kotawaringin Timur Kec. Mentaya Hulu Desa BawanMentaya Hulu, Tanjung Jariangau Mentaya Hulu	HP, HPK		±738	Pasal 110 B/Perhutanan Sosial
303.	KT Sejahtera Bersama	Perkebunan sawit rakyat dalam kawasan hutan	Kab. Kotawaringin Timur Kec. Mentaya Hulu Desa Santilik, Satiung	HP, HPK		±360	Pasal 110 B/Perhutanan Sosial

No.	Subyek Hukum	Jenis Kegiatan	Lokasi Kegiatan			Luasan Indikatif Areal Terbuka (Ha)	Skema Penyelesaian Sesuai UU Cipta Kerja
			Wilayah Administratif	Kawasan Hutan	Kesesuaian Ruang		
304.	KT Simpang Telu	Perkebunan sawit rakyat dalam kawasan hutan	Kab. Kotawaringin Timur Kec. Mentaya Hulu Desa Tanjunga Jariangau	HP, HPK		±697	Pasal 110 B/Perhutanan Sosial
305.	KT Subur Jaya	Perkebunan sawit rakyat dalam kawasan hutan	Kab. Kotawaringin Timur Kec. Mentaya Hulu Desa Penda Durian	HPK		±70	Pasal 110 B/Perhutanan Sosial
306.	KT Sungai Sungkup	Perkebunan sawit rakyat dalam kawasan hutan	Kab. Kotawaringin Timur Kec. Mentaya Hulu Desa Tanjung Jariangau	HP, HPK		±101	Pasal 110 B/Perhutanan Sosial
307.	KT Tarusan Batu	Perkebunan sawit rakyat dalam kawasan hutan	Kab. Kotawaringin Timur Kec. Mentaya Hulu Desa Tanjung Jariangau	HP, HPK		±93	Pasal 110 B/Perhutanan Sosial
308.	KT Tunas Harapan I	Perkebunan sawit rakyat dalam kawasan hutan	Kab. Kotawaringin Timur Kec. Mentaya Hilir Desa Santilik	HP, HPK		±212	Pasal 110 B/Perhutanan Sosial
309.	KT Tunas Harapan II	Perkebunan sawit rakyat dalam kawasan hutan	Kab. Kotawaringin Timur Kec. Mentaya Hulu Desa Santilik	HP, HPK		±456	Pasal 110 B/Perhutanan Sosial
310.	KUD Berkat Abadi	Perkebunan sawit rakyat dalam kawasan hutan	Kab. Seruyan Kec. Seruyan Tengah Desa Suka Makmur	HPK		±426	Pasal 110 B/Perhutanan Sosial

No.	Subyek Hukum	Jenis Kegiatan	Lokasi Kegiatan			Luasan Indikatif Areal Terbuka (Ha)	Skema Penyelesaian Sesuai UU Cipta Kerja
			Wilayah Administratif	Kawasan Hutan	Kesesuaian Ruang		
311.	KUD Sawit Jaya	Perkebunan sawit rakyat dalam kawasan hutan	Kab. Seruyan Kec. Seruyan Tengah Desa Suka Maju	HPK		±403	Pasal 110 B/Perhutanan Sosial
312.	KT Maju Bersama (1)	Perkebunan sawit rakyat dalam kawasan hutan	Kab. Seruyan Kec. Seruyan Hilir Desa Pematang Limau	HP		±182	Pasal 110 B/Perhutanan Sosial
313.	KT Maju Jaya Lestari	Perkebunan sawit rakyat dalam kawasan hutan	Kab. Seruyan Kec. Seruyan Hilir Desa Pematang Limau	HP		±178	Pasal 110 B/Perhutanan Sosial
314.	KT Sawit Bangkit	Perkebunan sawit rakyat dalam kawasan hutan	Kab. Seruyan Kec. Seruyan Tengah Desa Sukorejo	HPK		±857	Pasal 110 B/Perhutanan Sosial
315.	KT Ajang Maju Barokah	Perkebunan sawit rakyat dalam kawasan hutan	Kab. Sukamara Kec. Permata Kecubung Desa Ajang	HP		±125	Pasal 110 B/Perhutanan Sosial
316.	KT Ajang Sukses Tani	Perkebunan sawit rakyat dalam kawasan hutan	Kab. Sukamara Kec. Permata Kecubung Desa Ajang	HP, HPK		±29	Pasal 110 B/Perhutanan Sosial
317.	KT Bersatu Jaya	Perkebunan sawit rakyat dalam kawasan hutan	Kab. Sukamara Kec. Permata Kecubung Desa Kenawan	HP, HPK		±59	Pasal 110 B/Perhutanan Sosial
318.	KT Danau Purun	Perkebunan sawit rakyat dalam kawasan hutan	Kab. Sukamara Kec. Balai Riam Desa Air Dua	HP, HPK		±80	Pasal 110 B/Perhutanan Sosial
319.	KT Dukuh Lembakar	Perkebunan sawit rakyat dalam kawasan hutan	Kab. Sukamara Kec. Balai Riam Desa Air Dua	HP, HPK		±171	Pasal 110 B/Perhutanan Sosial

No.	Subyek Hukum	Jenis Kegiatan	Lokasi Kegiatan			Luasan Indikatif Areal Terbuka (Ha)	Skema Penyelesaian Sesuai UU Cipta Kerja
			Wilayah Administratif	Kawasan Hutan	Kesesuaian Ruang		
320.	KT Harapan Indah	Perkebunan sawit rakyat dalam kawasan hutan	Kab. Sukamara Kec. Permata Kecubung Desa Semantun	HPK		±114	Pasal 110 B/Perhutanan Sosial
321.	KT Jalungga Agro I	Perkebunan sawit rakyat dalam kawasan hutan	Kab. Sukamara Kec. Balai Riam Desa Jihing	HPK		±91	Pasal 110 B/Perhutanan Sosial
322.	KT Jalungga Agro II	Perkebunan sawit rakyat dalam kawasan hutan	Kab. Sukamara Kec. Balai Riam Desa Jihing	HPK		±485	Pasal 110 B/Perhutanan Sosial
323.	KT Karya Tani Sejahtera	Perkebunan sawit rakyat dalam kawasan hutan	Kab. Sukamara Kec. Permata Kecubung Desa Sembikuan	HP, HPK		±214	Pasal 110 B/Perhutanan Sosial
324.	KT Laman Baru Sejahtera	Perkebunan sawit rakyat dalam kawasan hutan	Kab. Sukamara Kec. Permata Kecubung Desa Laman Baru	HP, HPK		±193	Pasal 110 B/Perhutanan Sosial
325.	KT Maju Bersama (2)	Perkebunan sawit rakyat dalam kawasan hutan	Kab. Sukamara Kec. Sukamara Desa Karta Mulia	HP		±73	Pasal 110 B/Perhutanan Sosial
326.	KT Mapam Petarikan	Perkebunan sawit rakyat dalam kawasan hutan	Kab. Sukamara Kec. Sukamara Desa Petarikan	HPK		±188	Pasal 110 B/Perhutanan Sosial
327.	KT Muntai Mandiri	Perkebunan sawit rakyat dalam kawasan hutan	Kab. Sukamara Kec. Sukamara Desa Pangkalan Muntai	HPK		±92	Pasal 110 B/Perhutanan Sosial
328.	KT Nibung Sejahtera	Perkebunan sawit rakyat dalam kawasan hutan	Kab. Sukamara Kec. Permata Kecubung Desa Nibung Terjun	HP		±63	Pasal 110 B/Perhutanan Sosial

No.	Subyek Hukum	Jenis Kegiatan	Lokasi Kegiatan			Luasan Indikatif Areal Terbuka (Ha)	Skema Penyelesaian Sesuai UU Cipta Kerja
			Wilayah Administratif	Kawasan Hutan	Kesesuaian Ruang		
329.	KT Pagar Benua	Perkebunan sawit rakyat dalam kawasan hutan	Kab. Sukamara Kec. Permata Kecubung Desa Nibung Terjun	HP		±56	Pasal 110 B/Perhutanan Sosial
330.	KT Pelita Tani	Perkebunan sawit rakyat dalam kawasan hutan	Kab. Sukamara Kec. Permata Kecubung Desa Semantun	HP, HPK		±151	Pasal 110 B/Perhutanan Sosial
331.	KT Pengkayasan Muda	Perkebunan sawit rakyat dalam kawasan hutan	Kab. Sukamara Kec. Balai Riam Desa Pempaning	HP		±62	Pasal 110 B/Perhutanan Sosial
332.	KT Pudu Jaya Sejahtera	Perkebunan sawit rakyat dalam kawasan hutan	Kab. Sukamara Kec. Sukamara Desa Pudu Rundun	HP		±23	Pasal 110 B/Perhutanan Sosial
333.	KT Sagu Dandun	Perkebunan sawit rakyat dalam kawasan hutan	Kab. Sukamara Kec. Sukamara Desa Sukaraja	HP		±187	Pasal 110 B/Perhutanan Sosial
334.	KT Sepakat Bahaum	Perkebunan sawit rakyat dalam kawasan hutan	Kab. Sukamara Kec. Permata Kecubung Desa Nibung Terjun	HP, HPK		±77	Pasal 110 B/Perhutanan Sosial
335.	KT Sidomulyo	Perkebunan sawit rakyat dalam kawasan hutan	Kab. Sukamara Kec. Sukamara Desa Kartamulia	HP, HPK		±84	Pasal 110 B/Perhutanan Sosial
336.	KT Sinar Harapan	Perkebunan sawit rakyat dalam kawasan hutan	Kab. Sukamara Kec. Permata Kecubung Desa Semantun	HP, HPK		±138	Pasal 110 B/Perhutanan Sosial
337.	KT Sukses Bersama	Perkebunan sawit rakyat dalam kawasan hutan	Kab. Sukamara Kec. Sukamara Desa Kartamulia	HP		±29	Pasal 110 B/Perhutanan Sosial

No.	Subyek Hukum	Jenis Kegiatan	Lokasi Kegiatan			Luasan Indikatif Areal Terbuka (Ha)	Skema Penyelesaian Sesuai UU Cipta Kerja
			Wilayah Administratif	Kawasan Hutan	Kesesuaian Ruang		
338.	KT Sungai Insapan I	Perkebunan sawit rakyat dalam kawasan hutan	Kab. Sukamara Kec. Balai Riam Desa Balai Riam	HP, HPK		±371	Pasal 110 B/Perhutanan Sosial
339.	KT Sungai Insapan II	Perkebunan sawit rakyat dalam kawasan hutan	Kab. Sukamara Kec. Balai Riam Desa Balai Riam	HP, HPK		±215	Pasal 110 B/Perhutanan Sosial
340.	KT Sungai Kalampaian	Perkebunan sawit rakyat dalam kawasan hutan	Kab. Sukamara Kec. Permata Kecubung Desa Ajang	HP, HPK		±223	Pasal 110 B/Perhutanan Sosial
341.	KT Sungai Marau	Perkebunan sawit rakyat dalam kawasan hutan	Kab. Sukamara Kec. Balai Riam Desa Pempaning	HP		±232	Pasal 110 B/Perhutanan Sosial
342.	KT Sungai Tarantang	Perkebunan sawit rakyat dalam kawasan hutan	Kab. Sukamara Kec. Sukamara Desa Natai Sedawak	HP		±99	Pasal 110 B/Perhutanan Sosial
343.	KTH Langgeng Sejahtera	Perkebunan sawit dalam usulan Perhutanan Sosial	Kab. Kotawaringin Timur Kec. Mentaya Hilir Utara Desa Natai Baru	HP		±190	Pasal 110 B/Perhutanan Sosial
344.	Gapoktan Bemban Bersatu	Perkebunan sawit dalam usulan Perhutanan Sosial	Kab. Bangka Tengah Kec. Koba	HP		±1779	Pasal 110 B/Perhutanan Sosial
345.	Farmani	Kebun Karet	Kec Lokpaikat Kab Tapin	HP		±1,81	Pasal 110 B/Penataan Kawasan Hutan
346.	Nurdin dkk	Perkebunan Kelapa Sawit	Kel Pematang Pundu Kec Mandau Kab Bengkalis	HPT		±173,47	Pasal 110 B/Penataan Kawasan Hutan

No.	Subyek Hukum	Jenis Kegiatan	Lokasi Kegiatan			Luasan Indikatif Areal Terbuka (Ha)	Skema Penyelesaian Sesuai UU Cipta Kerja
			Wilayah Administratif	Kawasan Hutan	Kesesuaian Ruang		
347.	Archenius Napitupulu dkk	Perkebunan	Riau	HPT, HP		±766	Pasal 110 B/Penataan Kawasan Hutan
348.	David Harmoko Oloan dkk	Perkebunan	Riau	HPT		±93	Pasal 110 B/Penataan Kawasan Hutan
349.	Dharmawan Shahli dkk	Perkebunan	Riau	HP		±51,27	Pasal 110 B/Penataan Kawasan Hutan
350.	H Darmawi HMT	Perkebunan	Riau	HP		±2,68	Pasal 110 B/Penataan Kawasan Hutan
351.	Indra Sinaga dkk	Perkebunan	Riau	HPT, HP		±34	Pasal 110 B/Penataan Kawasan Hutan
352.	Kasbi	Perkebunan	Riau	HP		±1,33	Pasal 110 B/Penataan Kawasan Hutan
353.	Lasma Mariani Marpaung dkk	Perkebunan	Riau	HPT		±114	Pasal 110 B/Penataan Kawasan Hutan
354.	Meli Novriyanti dkk	Perkebunan	Riau	HP		±442	Pasal 110 B/Penataan Kawasan Hutan
355.	Oberlin Marbun dkk	Pertanian	Riau	HPT		±574	Pasal 110 B/Penataan Kawasan Hutan
356.	Pormian Simanungkalit dkk	Perkebunan	Riau	HPT, HP		±425	Pasal 110 B/Penataan Kawasan Hutan
357.	Yusril Aldi dkk	Penguasaan Tanah	Riau	HP		±524	Pasal 110 B/Penataan Kawasan Hutan
358.	Zevin Honggala Putra dkk	Perkebunan	Riau	TAHURA, HPT		±84	Pasal 110 B/Penataan Kawasan Hutan
359.	Zulfikri dkk	Perkebunan	Riau	HP		±5,55	Pasal 110 B/Penataan Kawasan Hutan

No.	Subyek Hukum	Jenis Kegiatan	Lokasi Kegiatan			Luasan Indikatif Areal Terbuka (Ha)	Skema Penyelesaian Sesuai UU Cipta Kerja
			Wilayah Administratif	Kawasan Hutan	Kesesuaian Ruang		
360.	Asarindo Riau Abadi, PT	Penguasaan Tanah	Kel Bagan Besar Kec Bukit Kapur Kota Dumai	HPK		±38,97	Pasal 110 A/Pasal 110 B
361.	Bandar Meriah, PT	Perkebunan Kelapa Sawit	Kec Sei Lapan Kab Langkat	HPT		±505,6	Pasal 110 A/Pasal 110 B
362.	Aktual Mitra, PT	Real estate	Kec Sekupang Kota Batam	HL		±1,12	Pasal 110 B
363.	Putra Bumi Sriwijaya, PT	Real estate	Kec Sekupang Kota Batam	HL		±12,21	Pasal 110 B
364.	Sarana Kharisma Djaja, PT	Real estate	Kec Sekupang Kota Batam	HL		±3,84	Pasal 110 B
365.	Natuna Endapan Emas, PT	Real estate	Kec Sekupang Kota Batam	HL		±0,63	Pasal 110 B
366.	Citra Perdana Cemerlang, PT	Real estate	Kec Sekupang Kota Batam	HL		±6,47	Pasal 110 B
367.	Mega Cipta Kepri, PT	Real estate	Kec Sekupang Kota Batam	HL		±14,81	Pasal 110 B
368.	Citra Batam Sukses, PT	Real estate	Kec Sekupang Kota Batam	HL		±0,71	Pasal 110 B
369.	Edofa Ciptagraha, PT	Real estate	Kec Sekupang Kota Batam	HL		±2,48	Pasal 110 B
370.	Salam Damai, PT	Real estate	Kec Sekupang Kota Batam	HL		±0,45	Pasal 110 B
371.	Prakarsa Anugrah, PT	Real estate	Kec Sekupang Kota Batam	HL		±2,06	Pasal 110 B
372.	Selaras Karsa Jaya, PT	Real estate	Kec Sekupang Kota Batam	HL		±0,36	Pasal 110 B

No.	Subyek Hukum	Jenis Kegiatan	Lokasi Kegiatan			Luasan Indikatif Areal Terbuka (Ha)	Skema Penyelesaian Sesuai UU Cipta Kerja
			Wilayah Administratif	Kawasan Hutan	Kesesuaian Ruang		
373.	Menteng Griya Lestari, PT	Real estate	Kec Sekupang Kota Batam	HL		±3,43	Pasal 110 B
374.	Pulau Jaya Lestari, PT	Real estate	Kec Sekupang Kota Batam	HL		±8,65	Pasal 110 B
375.	Devin Buana Perkasa, PT	Real estate	Kec Sekupang Kota Batam	HL		±0,48	Pasal 110 B
376.	Prochem Tritama, PT	Real estate	Kec Sekupang Kota Batam	HL		±1,26	Pasal 110 B
377.	Surya Citra Inti Semesta, PT	Real estate	Kec Sekupang Kota Batam	HL		±1,7	Pasal 110 B
378.	Ciptamas Sentosa, PT	Real estate	Kec Sekupang Kota Batam	HL		±1,02	Pasal 110 B
379.	Budi Propertindo Utama, PT	Real estate	Kec Sekupang Kota Batam	HL		±0,45	Pasal 110 B
380.	Melayu Batam Propertindo, PT	Real estate	Kec Sekupang Kota Batam	HL		±2,58	Pasal 110 B
381.	Nihon Global Tech, PT	Real estate	Kec Sekupang Kota Batam	HL		±1,75	Pasal 110 B
382.	Jasa Prima Mandiri, PT	Real estate	Kec Sekupang Kota Batam	HL		±13,44	Pasal 110 B
383.	Citra Semarak, PT	Galangan Kapal	Kec Sekupang Kota Batam	HL		±1,75	Pasal 110 B
384.	Natwell Shipyard Batam, PT	Galangan Kapal	Kec Sekupang Kota Batam	HL		±0,63	Pasal 110 B
385.	Hiasindah Bangun Raya, PT	Real estate	Kec Sekupang Kota Batam	HL		±3,35	Pasal 110 B

No.	Subyek Hukum	Jenis Kegiatan	Lokasi Kegiatan			Luasan Indikatif Areal Terbuka (Ha)	Skema Penyelesaian Sesuai UU Cipta Kerja
			Wilayah Administratif	Kawasan Hutan	Kesesuaian Ruang		
386.	Pantai Barelang Indah, PT	Real estate	Kec Sekupang Kota Batam	HL		±0,29	Pasal 110 B
387.	Utama Resort Batam, PT	Real estate	Kec Sekupang Kota Batam	HL		±10,21	Pasal 110 B
388.	Karlina Cahaya Loka, PT	Real estate	Kec Sekupang Kota Batam	HL		±0,76	Pasal 110 B
389.	Sinar Batam Propertindo, PT	Real estate	Kec Sekupang Kota Batam	HL		±0,57	Pasal 110 B
390.	Buana Cipta Propertindo, PT	Real estate	Kec Sekupang Kota Batam	HL		±2,61	Pasal 110 B
391.	Tunas Baru Highland, PT	Real estate	Kec Sekupang Kota Batam	HL		±0,96	Pasal 110 B
392.	Poktan Bantur Raya	Perkebunan Sawit Rakyat	Kotawaringin Timur, Kalimantan Tengah	HPK		±30,52	Pasal 110 B/Penataan Kawasan Hutan
393.	Poktan Habaring Huring	Perkebunan Sawit Rakyat	Kotawaringin Timur, Kalimantan Tengah	HPK		±46,57	Pasal 110 B/Penataan Kawasan Hutan
394.	Poktan Maju Bersama	Perkebunan Sawit Rakyat	Kotawaringin Timur, Kalimantan Tengah	HP, HPK		±133,95	Pasal 110 B/Penataan Kawasan Hutan
395.	Poktan Manunggal Tekat	Perkebunan Sawit Rakyat	Kotawaringin Timur, Kalimantan Tengah	HP, HPK		±73,30	Pasal 110 B/Penataan Kawasan Hutan
396.	Poktan Perjuangan	Perkebunan Sawit Rakyat	Kotawaringin Timur, Kalimantan Tengah	HP		±127,15	Pasal 110 B/Penataan Kawasan Hutan
397.	Poktan Perjuangan-2	Perkebunan Sawit Rakyat	Kotawaringin Timur, Kalimantan Tengah	HP, HPT, HPK		±38,30	Pasal 110 B/Penataan Kawasan Hutan
398.	Poktan Saluang	Perkebunan Sawit Rakyat	Kotawaringin Timur, Kalimantan Tengah	HPK		±104,16	Pasal 110 B/Penataan Kawasan Hutan

No.	Subyek Hukum	Jenis Kegiatan	Lokasi Kegiatan			Luasan Indikatif Areal Terbuka (Ha)	Skema Penyelesaian Sesuai UU Cipta Kerja
			Wilayah Administratif	Kawasan Hutan	Kesesuaian Ruang		
399.	Poktan Sei Kawang	Perkebunan Sawit Rakyat	Kotawaringin Timur, Kalimantan Tengah	HPK		±120,38	Pasal 110 B/Penataan Kawasan Hutan
400.	Poktan Sei Keruh Jaya	Perkebunan Sawit Rakyat	Kotawaringin Timur, Kalimantan Tengah	HPK		±254,69	Pasal 110 B/Penataan Kawasan Hutan
401.	Poktan Sei Keruh Jaya_2	Perkebunan Sawit Rakyat	Kotawaringin Timur, Kalimantan Tengah	HP, HPK		±702,84	Pasal 110 B/Penataan Kawasan Hutan
402.	Poktan Sejahtera Bersama	Perkebunan Sawit Rakyat	Kotawaringin Timur, Kalimantan Tengah	HP, HPK		±359,57	Pasal 110 B/Penataan Kawasan Hutan
403.	Poktan Sempang Telu	Perkebunan Sawit Rakyat	Kotawaringin Timur, Kalimantan Tengah	HP, HPK		±680,08	Pasal 110 B/Penataan Kawasan Hutan
404.	Poktan Subur Jaya	Perkebunan Sawit Rakyat	Kotawaringin Timur, Kalimantan Tengah	HPK		±69,63	Pasal 110 B/Penataan Kawasan Hutan
405.	Poktan Sungai Sungkup	Perkebunan Sawit Rakyat	Kotawaringin Timur, Kalimantan Tengah	HP, HPK		±101,36	Pasal 110 B/Penataan Kawasan Hutan
406.	Poktan Tarusan Batu	Perkebunan Sawit Rakyat	Kotawaringin Timur, Kalimantan Tengah	HP, HPK		±70,95	Pasal 110 B/Penataan Kawasan Hutan
407.	Poktan Tunas Harapan_1	Perkebunan Sawit Rakyat	Kotawaringin Timur, Kalimantan Tengah	HP, HPK		±184,85	Pasal 110 B/Penataan Kawasan Hutan
408.	Poktan Tunas Harapan-2	Perkebunan Sawit Rakyat	Kotawaringin Timur, Kalimantan Tengah	HP, HPK		±423,26	Pasal 110 B/Penataan Kawasan Hutan
409.	Poktan KUD Berkat Abadi	Perkebunan Sawit Rakyat	Seruyan, Kalimantan Timur	HPK		±425,63	Pasal 110 B/Penataan Kawasan Hutan
410.	Poktan KUD Sawit Jaya	Perkebunan Sawit Rakyat	Seruyan, Kalimantan Timur	HPK		±401,58	Pasal 110 B/Penataan Kawasan Hutan
411.	Poktan Maju Bersama	Perkebunan Sawit Rakyat	Seruyan, Kalimantan Timur	HP		±181,53	Pasal 110 B/Penataan Kawasan Hutan

No.	Subyek Hukum	Jenis Kegiatan	Lokasi Kegiatan			Luasan Indikatif Areal Terbuka (Ha)	Skema Penyelesaian Sesuai UU Cipta Kerja
			Wilayah Administratif	Kawasan Hutan	Kesesuaian Ruang		
412.	Poktan Maju Jaya Lestari	Perkebunan Sawit Rakyat	Seruyan, Kalimantan Timur	HP		±178,45	Pasal 110 B/Penataan Kawasan Hutan
413.	Poktan Sawit Bangkit	Perkebunan Sawit Rakyat	Seruyan, Kalimantan Timur	HPK		±855,87	Pasal 110 B/Penataan Kawasan Hutan
414.	Poktan Ajang Maju Barokah	Perkebunan Sawit Rakyat	Seruyan, Kalimantan Timur	HP, HPK		±123,62	Pasal 110 B/Penataan Kawasan Hutan
415.	Poktan Ajang Sukses Tani	Perkebunan Sawit Rakyat	Seruyan, Kalimantan Timur	HP, HPK		±25,83	Pasal 110 B/Penataan Kawasan Hutan
416.	Poktan Bersatu Jaya	Perkebunan Sawit Rakyat	Seruyan, Kalimantan Timur	HP, HPK		±59,03	Pasal 110 B/Penataan Kawasan Hutan
417.	Poktan Danau Purun	Perkebunan Sawit Rakyat	Seruyan, Kalimantan Timur	HP, HPK		±79,58	Pasal 110 B/Penataan Kawasan Hutan
418.	Poktan Dukuh Lembakar	Perkebunan Sawit Rakyat	Seruyan, Kalimantan Timur	HP, HPK		±170,47	Pasal 110 B/Penataan Kawasan Hutan
419.	Poktan Harapan Indah	Perkebunan Sawit Rakyat	Seruyan, Kalimantan Timur	HP, HPK		±114,17	Pasal 110 B/Penataan Kawasan Hutan
420.	Poktan Jalungga Agro I	Perkebunan Sawit Rakyat	Seruyan, Kalimantan Timur	HP, HPK		±91,19	Pasal 110 B/Penataan Kawasan Hutan
421.	Poktan Jalungga Agro II	Perkebunan Sawit Rakyat	Seruyan, Kalimantan Timur	HP, HPK		±484,29	Pasal 110 B/Penataan Kawasan Hutan
422.	Poktan Karya Tani Sejahtera	Perkebunan Sawit Rakyat	Seruyan, Kalimantan Timur	HP, HPK		±213,78	Pasal 110 B/Penataan Kawasan Hutan
423.	Poktan Laman Baru Sejahtera	Perkebunan Sawit Rakyat	Seruyan, Kalimantan Timur	HP, HPK		±192,59	Pasal 110 B/Penataan Kawasan Hutan
424.	Poktan Maju Bersama	Perkebunan Sawit Rakyat	Seruyan, Kalimantan Timur	HP		±73,24	Pasal 110 B/Penataan Kawasan Hutan

No.	Subyek Hukum	Jenis Kegiatan	Lokasi Kegiatan			Luasan Indikatif Areal Terbuka (Ha)	Skema Penyelesaian Sesuai UU Cipta Kerja
			Wilayah Administratif	Kawasan Hutan	Kesesuaian Ruang		
425.	Poktan Mapam Petarikan	Perkebunan Sawit Rakyat	Seruyan, Kalimantan Timur	HPK		±187,92	Pasal 110 B/Penataan Kawasan Hutan
426.	Poktan Muntai Mandiri	Perkebunan Sawit Rakyat	Seruyan, Kalimantan Timur	HP		±91,48	Pasal 110 B/Penataan Kawasan Hutan
427.	Poktan Nibung Sejahtera	Perkebunan Sawit Rakyat	Seruyan, Kalimantan Timur	HP		±62,05	Pasal 110 B/Penataan Kawasan Hutan
428.	Poktan Pagar Benua	Perkebunan Sawit Rakyat	Seruyan, Kalimantan Timur	HP		±38,85	Pasal 110 B/Penataan Kawasan Hutan
429.	Poktan Pelita Tani	Perkebunan Sawit Rakyat	Seruyan, Kalimantan Timur	HP, HPK		±150,64	Pasal 110 B/Penataan Kawasan Hutan
430.	Poktan Pengkayasan Muda	Perkebunan Sawit Rakyat	Seruyan, Kalimantan Timur	HP		±28,74	Pasal 110 B/Penataan Kawasan Hutan
431.	Poktan Pudu Jaya Sejahtera	Perkebunan Sawit Rakyat	Seruyan, Kalimantan Timur	HP		±23,06	Pasal 110 B/Penataan Kawasan Hutan
432.	Poktan Sagu Dandun	Perkebunan Sawit Rakyat	Seruyan, Kalimantan Timur	HP		±186,79	Pasal 110 B/Penataan Kawasan Hutan
433.	Poktan Sidomulyo	Perkebunan Sawit Rakyat	Seruyan, Kalimantan Timur	HP, HPK		±84,26	Pasal 110 B/Penataan Kawasan Hutan
434.	Poktan Sinar Harapan	Perkebunan Sawit Rakyat	Seruyan, Kalimantan Timur	HP, HPK		±137,70	Pasal 110 B/Penataan Kawasan Hutan
435.	Poktan Sukses Bersama	Perkebunan Sawit Rakyat	Seruyan, Kalimantan Timur	HP		±29,42	Pasal 110 B/Penataan Kawasan Hutan
436.	Poktan Sungai Insapan I	Perkebunan Sawit Rakyat	Seruyan, Kalimantan Timur	HP, HPK		±370,33	Pasal 110 B/Penataan Kawasan Hutan
437.	Poktan Sungai Insapan II	Perkebunan Sawit Rakyat	Seruyan, Kalimantan Timur	HP, HPK		±214,43	Pasal 110 B/Penataan Kawasan Hutan

No.	Subyek Hukum	Jenis Kegiatan	Lokasi Kegiatan			Luasan Indikatif Areal Terbuka (Ha)	Skema Penyelesaian Sesuai UU Cipta Kerja
			Wilayah Administratif	Kawasan Hutan	Kesesuaian Ruang		
438.	Poktan Sungai Kalampaian	Perkebunan Sawit Rakyat	Seruyan, Kalimantan Timur	HP, HPK		±222,61	Pasal 110 B/Penataan Kawasan Hutan
439.	Poktan Sungai Marau	Perkebunan Sawit Rakyat	Seruyan, Kalimantan Timur	HP		±225,01	Pasal 110 B/Penataan Kawasan Hutan
440.	Poktan Sungai Tarantang	Perkebunan Sawit Rakyat	Seruyan, Kalimantan Timur	HP		±98,28	Pasal 110 B/Penataan Kawasan Hutan
441.	KT Sumber Makmur Bersama (Rinto JP Naibaho)	Penguasaan Lahan (Perkebunan Kelapa Sawit)	Riau dan Jambi	HPT		±331,68	Pasal 110 B/Penataan Kawasan Hutan
442.	Badrun	Penguasaan Lahan (Perkebunan Kelapa Sawit)	Kec. Tapung, Kab. Kampar, Riau	HPK, APL		±758,64	Pasal 110 B/Penataan Kawasan Hutan
443.	Effendi Rambe	Penguasaan Lahan (Perkebunan Kelapa Sawit)	Kota Dumai, Riau	HP, HPK		±766,98	Pasal 110 B/Penataan Kawasan Hutan
444.	Baktiar Sormin	Penguasaan Lahan (Perkebunan Kelapa Sawit)	Riau	HPK		±2	Pasal 110 B/Penataan Kawasan Hutan
445.	Frans Rikoli Panggabean	Penguasaan Lahan (Perkebunan Kelapa Sawit)	Riau	HPK		±1	Pasal 110 B/Penataan Kawasan Hutan
446.	KT Gulamo (Dijon Sitohang)	Penguasaan Lahan (Perkebunan Kelapa Sawit)	Rokan Hilir, Riau	HPT, HPK		±751,23	Pasal 110 B/Penataan Kawasan Hutan
447.	Indra Perkasa, PT	Perkebunan dan Bangunan	Sumatera Utara	HP		±92,37	Pasal 110 B

No.	Subyek Hukum	Jenis Kegiatan	Lokasi Kegiatan			Luasan Indikatif Areal Terbuka (Ha)	Skema Penyelesaian Sesuai UU Cipta Kerja
			Wilayah Administratif	Kawasan Hutan	Kesesuaian Ruang		
448.	KT Teluk Pulaui ujung Tanjung	Perkebunan dan Semak Belukar Rawa	Kec. Pancung Soal,	HL, HPK		±94,51	Pasal 110 B/Penataan Kawasan Hutan
449.	PLN, PT	SUTT Bukit Kemuning - Liwa	Lampung Utara dan Lampung Barat, Lampung	HL		±9,36	Pasal 11 B
450.	SKK Migas – PetroChina International Jabung Ltd (PCLJ)	Jalur Pipa Minyak dan Gas	Tanjung jabung Barat dan Tanjung Jabung Timur, Jambi	HL, HP		±44,84	Pasal 11 B
451.	Gemah Ripah Pratama, PT	Jetty	Morowali Utara, Sulawesi Tengah	KSA/KPA		±0,38	Pasal 11 B
452.	Gapoktan Bemban Bersatu	Perkebunan Kelapa Sawit	Kepulauan Bangka Belitung	HP		±2.957	Pasal 110 B/Penataan Kawasan Hutan
453.	Kementerian PUPR	Jalan Tol Serang Panimbang	Banten	HPT	HPT	±15,60	Pasal 11 B
454.	Tirta Madu 2, PT	Perkebunan Kelapa Sawit	Kepulauan Riau	HP	APL	±40,74	Pasal 110 A/Pasal 110 B
455.	Diana Alemin Barus	Perkebunan Kelapa Sawit	Sumatera Utara	HK		±29,73	Pasal 110 B/Penataan Kawasan Hutan
456.	KT Cahaya Tani (Erwinsyah)	Perkebunan Kelapa Sawit	Desa Buluh Nipis, Kec. Siak Hulu, Kab. Kampar, Riau	HPT		±52,7	Pasal 110 B/Penataan Kawasan Hutan
457.	Dinas Kehutanan Jawa Timur	Sarana Prasarana Kantor	Jawa Timur	HP		±1,35	Pasal 110 B
458.	Bupati Morotai	Penguasaan Lahan	Kab. Pulau Morotai, Maluku Utara	HL, HPT, HPK		±3.460,43	Pasal 110 B/Penataan Kawasan Hutan

No.	Subyek Hukum	Jenis Kegiatan	Lokasi Kegiatan			Luasan Indikatif Areal Terbuka (Ha)	Skema Penyelesaian Sesuai UU Cipta Kerja
			Wilayah Administratif	Kawasan Hutan	Kesesuaian Ruang		
459.	Tanu Erwan	Penguasaan Lahan	Sumatera Utara	HL		±29,94	Pasal 110 B/Penataan Kawasan Hutan
460.	Susanto Nurjono	Penguasaan Lahan	Sumatera Utara	HPK		±93,50	Pasal 110 B/Penataan Kawasan Hutan
461.	Haryo Sinaga	Penguasaan Lahan	Kepulauan Riau	HL		±2,57	Pasal 110 B/Penataan Kawasan Hutan
462.	Delfian Hertinus	Penguasaan Lahan	Kepulauan Riau	HL, APL		±7,01	Pasal 110 B/Penataan Kawasan Hutan
463.	Rahmat Putra Bunaya, ST	Penguasaan Lahan	Kepulauan Riau	HL		±5,26	Pasal 110 B/Penataan Kawasan Hutan
464.	Cemerlang Sukses Vaname, PT	Tambak Udang	Kepulauan Riau	HL, HPK		±54,76	Pasal 110 B
465.	Forum Masyarakat Peduli Pembangunan (Formapp)	Penguasaan Lahan	Sumatera Utara	HPK, APL		±1.662,45	Pasal 110 B/Penataan Kawasan Hutan
466.	Rai Kumar dkk	Penguasaan Lahan	Kepulauan Riau	HPT, APL		±26,67	Pasal 110 B/Penataan Kawasan Hutan
467.	PT Golden Matahari Batam	Perkebunan dan Tambak	Kepulauan Riau	HL, APL		±20,32	Pasal 110 B
468.	Ahmad Ali	Penguasaan Lahan	Riau	HPT, HPK		±95,13	Pasal 110 B/Penataan Kawasan Hutan
469.	Ali	Penguasaan Lahan	Riau	HPK		±181,81	Pasal 110 B/Penataan Kawasan Hutan
470.	Budiman	Penguasaan Lahan	Riau	HPK		±8,55	Pasal 110 B/Penataan Kawasan Hutan

No.	Subyek Hukum	Jenis Kegiatan	Lokasi Kegiatan			Luasan Indikatif Areal Terbuka (Ha)	Skema Penyelesaian Sesuai UU Cipta Kerja
			Wilayah Administratif	Kawasan Hutan	Kesesuaian Ruang		
471.	Doctoria Sonya Marfaindest	Penguasaan Lahan	Riau	HP, HPT		±22,50	Pasal 110 B/Penataan Kawasan Hutan
472.	Elisa Vivaldi	Penguasaan Lahan	Riau	HP		±19,54	Pasal 110 B/Penataan Kawasan Hutan
473.	Joni dkk	Penguasaan Lahan	Riau	HPT		±64,09	Pasal 110 B/Penataan Kawasan Hutan
474.	Khaidir dkk	Penguasaan Lahan	Riau	HP		±150,06	Pasal 110 B/Penataan Kawasan Hutan
475.	Maryaty	Penguasaan Lahan	Riau	HP, APL		±71,78	Pasal 110 B/Penataan Kawasan Hutan
476.	Tommy Zulker dkk	Penguasaan Lahan	Riau	HPK		±203,91	Pasal 110 B/Penataan Kawasan Hutan
477.	Djoni Suharly	Penguasaan Lahan	Kepulauan Bangka Belitung	HP, APL		±3,72	Pasal 110 B/Penataan Kawasan Hutan
478.	Melkishedek Phing, Lim	Penguasaan Lahan	Kepulauan Bangka Belitung	HL		±144,56	Pasal 110 B/Penataan Kawasan Hutan
479.	PT PLN (Persero) UIW NTB	Pembangunan Jaringan Listrik Desa Rarak Ronges dan Bangkat Monteh	Sumbawa Barat, NTB	HPT, HP		1,404	Pasal 110 B
480.	PT PLN (Persero) UIW NTB	Pembangunan Jaringan Listrik Desa Batudulang	Sumbawa, NTB	HL, HPT		0,29	Pasal 110 B
481.	PT PLN (Persero) UIW NTB	Pembangunan Jaringan Listrik Desa Kelawis	Sumbawa, NTB	HPT		0,69	Pasal 110 B
482.	PT PLN (Persero) UIW NTB	Pembangunan Jaringan Listrik Desa Lantung	Sumbawa, NTB	HL		1,30	Pasal 110 B

No.	Subyek Hukum	Jenis Kegiatan	Lokasi Kegiatan			Luasan Indikatif Areal Terbuka (Ha)	Skema Penyelesaian Sesuai UU Cipta Kerja
			Wilayah Administratif	Kawasan Hutan	Kesesuaian Ruang		
483.	PT PLN (Persero) UIW NTB	Pembangunan Jaringan Listrik Desa Jotang Beru	Sumbawa, NTB	HL		0,12	Pasal 110 B
484.	PT PLN (Persero) UIW NTB	Pembangunan Jaringan Listrik Desa Mata	Sumbawa, NTB	HPT		0,65	Pasal 110 B
485.	PT PLN (Persero)	SUTT 150 Kv Bangkanai – Muara Teweh	Sumbawa, NTB	HPT, HPT, HPK		67,76	Pasal 110 B
486.	PT PLN (Persero)	SUTT 150 Kv Muara Teweh – Puruk Cahu	Barito Utara, Kalteng	HP, HPK		47,02	Pasal 110 B
487.	PT PLN (Persero)	SUTT 150 Kv Kuala Kurun – Kasongan (Section 1 & 2)	Barito Utara dan Murung Raya, Kalteng	HP, HPK		127,11	Pasal 110 B
488.	PT PLN (Persero)	SUTT 150 Kv Sampit – Pangkalan Bun	Gunung Mas, Katingan, dan Kota Palangkaraya, Kalteng	HPT, HPT, HPK		79,63	Pasal 110 B
489.	PT PLN (Persero)	GI Kasongan	Seruyan dan Kotawaringin Timur, Kalteng	HPK		6,31	Pasal 110 B
490.	PT PLN (Persero)	PLTMG Bangkanai	Barito Utara, Kalteng	HP		26,25	Pasal 110 B
491.	PT PLN (Persero)	SUTT 150 Kv Sampit - Sampit	Kotawaringin Timur, Kalteng	HP, HPK		2,73	Pasal 110 B
492.	Samudera Berhasil Bersama, PT	Pembangunan Kanal/Saluran Air	Bangka Selatan, Kep. Bangka Belitung	HL		0,69	Pasal 110 B
493.	Malay Nusantara Sukses, PT	Pertambangan Komoditas batuan Granit	Indragiri Hilir, Riau	HPT		98,02 (Perkebunan) 1,42 (Tanah Terbuka)	Pasal 110 B

No.	Subyek Hukum	Jenis Kegiatan	Lokasi Kegiatan			Luasan Indikatif Areal Terbuka (Ha)	Skema Penyelesaian Sesuai UU Cipta Kerja
			Wilayah Administratif	Kawasan Hutan	Kesesuaian Ruang		
494.	Triple Eight Energy, PT	Pembangunan Jalan Angkut ke Pelabuhan	Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara	HL		-	Pasal 110 B
495.	Meta Adhi Perdana, PT	OP Nikel dan Sarana Penunjangnya	Konawe Utara, Sulawesi Tenggara	HP		8,16	Pasal 110 B
496.	Pemerintah Nusa Tenggara Barat	Pembangunan TPA Lemer	Lombok Barat, NTB	HPT		-	Pasal 110 B
497.	Pemerintah Provinsi Jawa Barat	Pembangunan TPA Nambo	Bogor, Jawa Barat	HP		-	Pasal 110 B

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRO HUKUM,



MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN
KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SITI NURBAYA